



**PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENGETAHUAN
TENTANG MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH YANG
DIMILIKI OLEH ANGGOTA KOMITE SEKOLAH
TERHADAP KINERJA KOMITE SEKOLAH DI SMA KOTA
DAN KABUPATEN MAGELANG**

Tesis

Untuk memperoleh gelar Magister Pendidikan
Pada Universitas Negeri Semarang

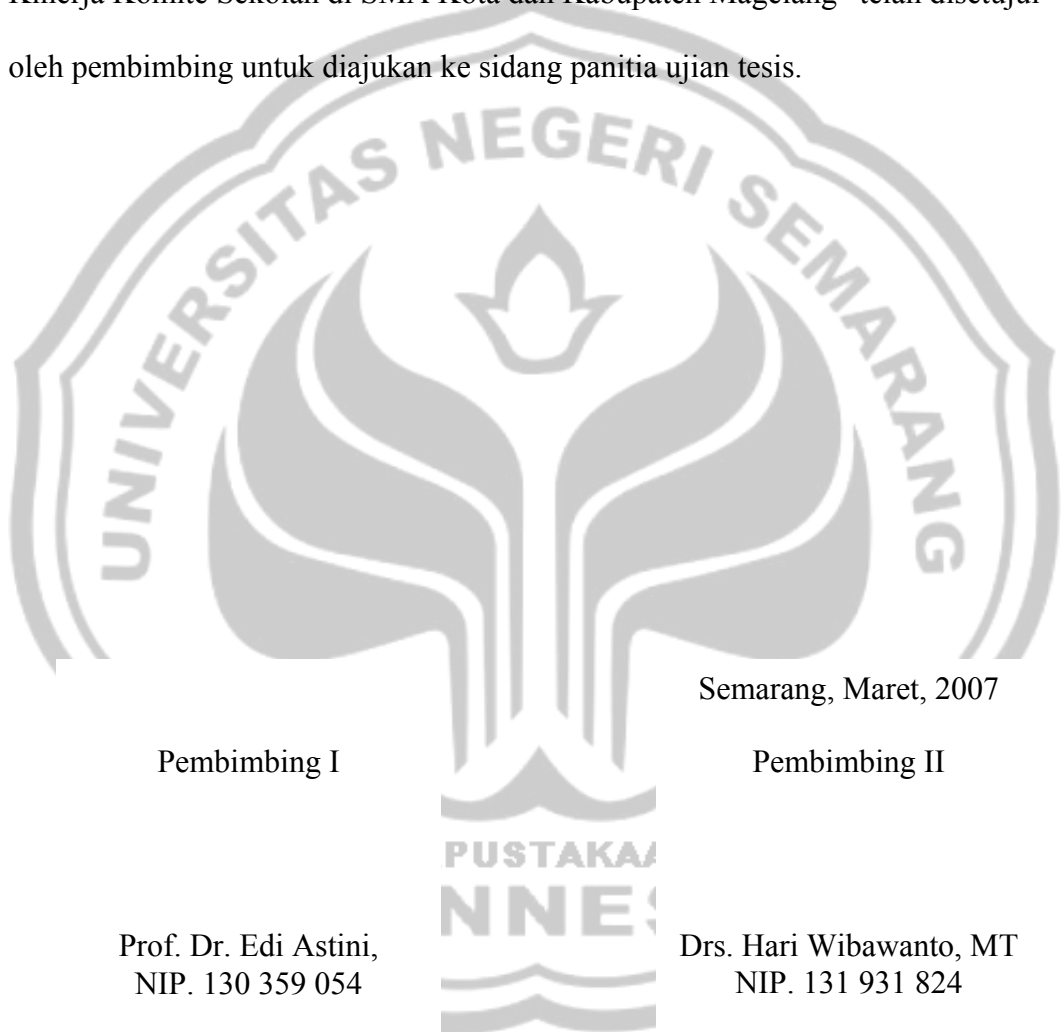
Oleh

Pandoyo
1103504054

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2007**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “ Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Tentang Manajemen Berbasis Sekolah yang dimiliki anggota Komite Sekolah Terhadap Kinerja Komite Sekolah di SMA Kota dan Kabupaten Magelang” telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian tesis.



Semarang, Maret, 2007

Pembimbing I

Pembimbing II

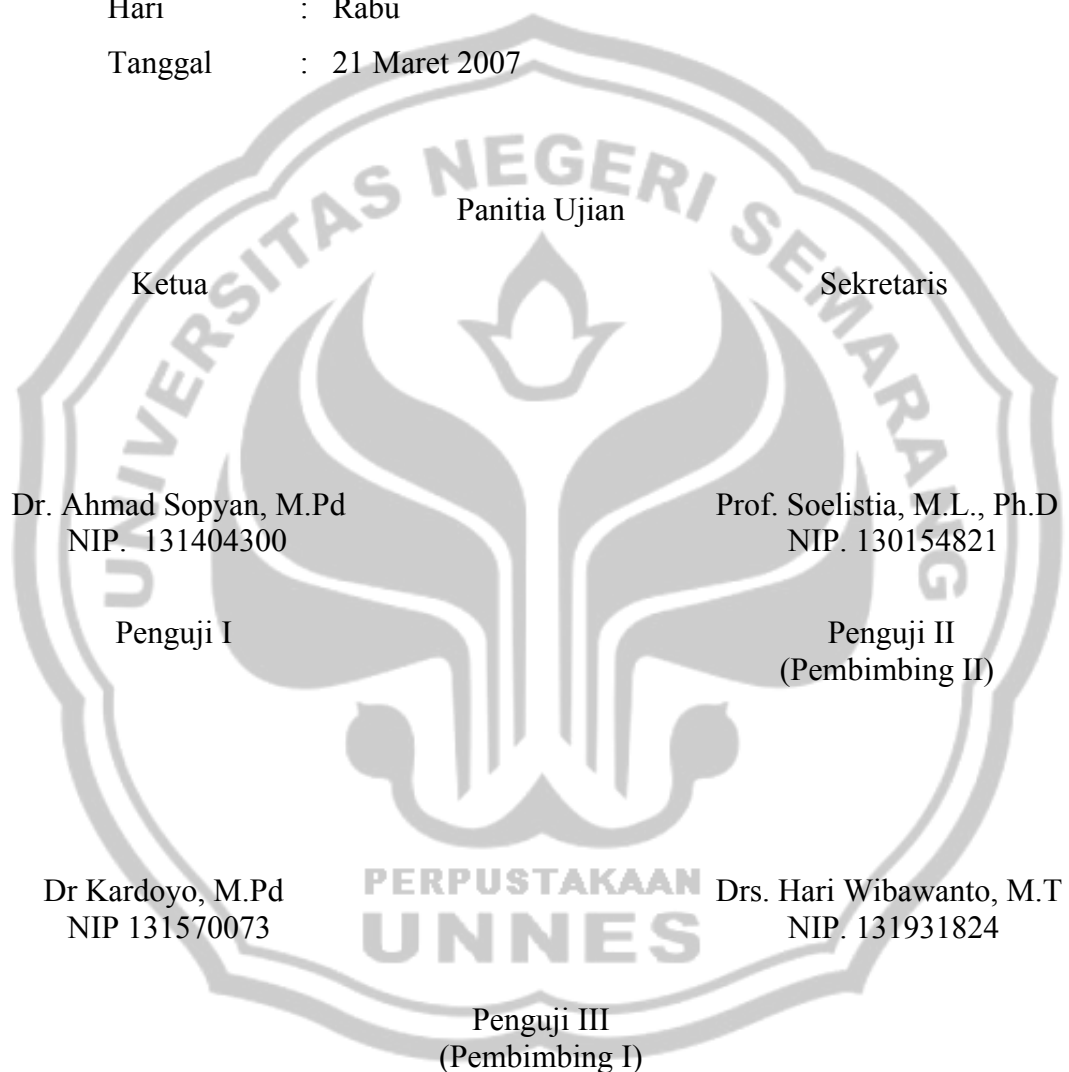
Prof. Dr. Edi Astini,
NIP. 130 359 054

Drs. Hari Wibawanto, MT
NIP. 131 931 824

PENGESAHAN KELULUSAN

Tesis ini telah dipertahankan di dalam Sidang Panitia Ujian Tesis Program Studi Manajemen Pendidikan , Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang pada

Hari : Rabu
Tanggal : 21 Maret 2007



Prof. Dr. Edi Astini
NIP. 130359054

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam tesis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat dan temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Maret, 2007

Pandoyo

NIM: 1103504054



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sebaik-baik manusia adalah orang yang berilmu dan mengamalkannya.



Untuk istriku

Putra – putriku

Orang tuaku

Sahabat - sahabatku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wata'ala atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga panulis dapat menyelesaikan tugas tesis ini dengan judul “ Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Tentang Manajemen Berbasis Sekolah yang dimiliki oleh anggota Komite Sekolah Terhadap Kinerja Komite Sekolah di SMA Kota dan Kabupaten Magelang “ ini dengan baik

Terselesainya tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu sudah seharusnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor dan Direktur Program Pasca Sarjana UNNES beserta staf yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti dan menyelesaikan studi.
2. Prof. Dr. Edi Astini dan Drs. Hari Wibawanto, MT, sebagai dosen Pembimbing yang telah banyak membantu membimbing, mengarahkan dan memberikan dorongan sampai tesis ini selesai.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota dan Kabupaten Magelang yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian.
4. Teman – teman mahasiswa PPS UNNES dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga amal dan budi baik dari berbagai pihak tersebut senantiasa mendapat pahala dari Allah.

Harapan penulis semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya dan kemajuan pendidikan pada umumnya.

Semarang, Maret 2007

Penulis

SARI

Pandoyo. 2007. *Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Tentang Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dimiliki oleh anggota Komite Sekolah Terhadap Kinerja Komite Sekolah di SMA Kota dan Kabupaten Magelang*. Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Prof. Dr. Edi Astini. II. Drs. Hari Wibawanto, MT

Kata Kunci: Manajemen Berbasis Sekolah, Komite Sekolah, kinerja, tingkat pendidikan, pengetahuan

Kinerja komite sekolah menjadi salah satu faktor penting bagi keberhasilan pelaksanaan MBS di sekolah. Oleh karena itu perlu dilihat bagaimana kinerja komite sekolah yang telah dibentuk dan apakah kinerja ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah. Masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) bagaimana hubungan antara tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dengan kinerja komite sekolah? 2) bagaimana hubungan antara tingkat pendidikan dan kinerja komite sekolah jika pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dikendalikan? 3) bagaimana hubungan antara pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dan kinerja komite sekolah jika tingkat pendidikan dikendalikan?

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, jenis penelitian survai. Data penelitian berupa tingkat pendidikan, nilai pengetahuan subjek tentang MBS dan kinerja komite sekolah. Instrumen pengambil data terdiri atas angket dan tes objektif. Data dianalisis dengan menggunakan regresi ganda (dua prediktor).

Hasil penelitian menunjukkan: 1) ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan anggota Komite Sekolah dan Pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dengan Kinerja komite sekolah. Harga koefisien korelasi ganda, $R = 0,909$, $R^2 = 0,827$, dan persamaan linear, 2) ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dan kinerja komite sekolah jika pendidikan dikendalikan, harga koefisien korelasi parsial ($r = 0,909$ dengan $P = 0,000$ ($P < \alpha$), atau pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah mempengaruhi kinerja komite sekolah, 3) tidak ada hubungan yang bermakna antara pendidikan dan kinerja komite sekolah jika pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dikendalikan, harga koefisien korelasi ($r = 0,205$ dengan $P = 0,076$ ($P > \alpha$).

Berdasarkan kesimpulan dapat disarankan beberapa hal antara lain: Anggota Komite Sekolah perlu dipilih dari orang-orang yang benar-benar mengetahui mengenai Manajemen Berbasis Sekolah. Pihak sekolah maupun dinas perlu melakukan sosialisasi secara mendalam baik mengenai MBS secara luas maupun khusus pada komite sekolah, Anggota Komite Sekolah yang sedang menjalankan tugas hendaknya selalu meningkatkan pengetahuannya.

ABSTRACT

Pandoyo. 2007. **Effect of Education Level and Knowledge of School Based Management (SBM) on Performance of School Committee Members of Senior High School in Magelang Residence.** Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I.Prof. Dr. Edi Astini. II.Drs. Hari Wibawanto, MT

Key Words: School Based Management, School Committee, performance, education level, knowledge

Along with autonomic will implementation, government has done some refinement in education area to make more democratic education process, cover every students need and state condition, and rise up society participation. This refinement is implemented on School based Management (SBM) project. Society encouragement to this project is represented on school committee. Performance of school committee members is a main factor of SBM successfulness implementation. For that it has to be seen the performance of school committee members elected and how the performance is influenced by education level and SBM knowledge.

Based on the back ground explained, the aims of this study are to know: 1) how far the correlation between education level and SBM knowledge and performance of School Committee Members is, 2) how far is the correlation between education level and performance of School Committee Members is if SBM knowledge is controlled, 3) how far is the correlation between SBM knowledge and performance of School Committee Members is if education level is controlled

This study was a survey research with descriptive method. The data of this study were mark of education level, SBM knowledge, and performance of School Committee Members. The instrument to gather the data were questioner including a question about the highest education of the subject get and performance self assessment and SBM knowledge assessment in objective test type. Multiple regression was implemented to analyze data.

Based on the data analysis, it showed that: 1) there is a positive and significant correlation between education level and SBM knowledge and performance of school committee members. Multiple correlation coefficient value is $R = 0,909$ and $R^2 = 0,827$, 2) there is a positive and significant correlation between SBM knowledge and performance of school committee members if education level is controlled. Correlation coefficient value (r) = 0,909 and $P = 0,000$ ($P < \alpha$), it can be concluded that SBM knowledge affected performance of school committee members, 3) there is no positive and significant correlation between education level and performance of school committee members if SBM knowledge is controlled. Correlation coefficient (r) = 0,205 and $P = 0,076$ ($P > \alpha$). it can be concluded that education level did not affected performance of school committee members

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
SARI	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Perumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Pustaka	8
B. Kajian Teoritis	11

1. Kinerja	11
2. Komite Sekolah dan Penilaian Kinerja Komite Sekolah	14
3. Tingkat Pendidikan	29
4. Pengetahuan tentang Manajemen Berbasis Sekolah	40
C. Kerangka Berpikir	58
a. Hubungan antara Tingkat Pendidikan anggota Komite Sekolah dengan Kinerja Komite Sekolah.....	58
b. Hubungan antara Pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dengan Kinerja Komite Sekolah	59
c. Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dengan Kinerja Komite Sekolah	61
D. Hipotesis	62
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	63
B. Desain Penelitian	63
C. Definisi Operasional Variabel Penelitian	63
D. Populasi dan Sampel Penelitian	64
E. Metode Penelitian	65
F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian	65
G. Teknik Analisis Data	67

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	73
B. Pembahasan	74
1. Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dengan Kinerja Komite Sekolah	74
2. Hubungan Pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dengan Kinerja Komite Sekolah	75
3. Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Kinerja Komite Sekolah	77
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	80
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	

PERPUSTAKAAN
UNNES

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		hal
1.	Penjabaran Peran Komite Sekolah ke dalam Fungsi Komite Sekolah dan Kegiatan Operasionalnya	21
2	Matrik Hubungan Kegiatan Operasional Komite Sekolah dan Faktor Penilaian Kinerja	25
3.	Jumlah Anggota Komite Sekolah dari setiap Sekolah Sampel.....	64
4.	Skor Pendidikan Anggota Komite Sekolah	65
5.	Rangkuman Data Kinerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan	66
6.	Rangkuman Data Kinerja Berdasarkan Pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah	66
7.	Hasil Analisis Penentuan Model Garis Lurus	69
8.	Hasil Analisis Penentuan Prediksi Variabel Terikat oleh Variabel Bebas.....	69
9.	Hasil Analisis Penentuan Koefisien Korelasi Ganda	70
10.	Hasil Analisis Korelasi antara Pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dan Kinerja Komite Sekolah jika Pendidikan Dikendalikan	71
11.	Hasil Analisis Korelasi antara Pendidikan dan Kinerja Komite Sekolah jika Pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah Dikendalikan	71
12.	Rangkuman Data Penelitian	73

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Lampiran		hal
1.	Instrumen Pendidikan	86
	a. Angket Penelitian Mandiri Kinerja Komite Sekolah	86
	b. Angket Penilaian Mandiri tentang MBS	88
2.	Analisis Data	94
3.	Surat-surat	103
	a. Surat Ijin Penelitian dari Universitas Negeri Semarang	103
	b. Surat Ijin Penelitian dari Dinas Pendidikan Kota Magelang	104
	c. Surat Ijin Penelitian dari Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang	
	d. Surat Keterangan Penelitian di SMAN 1 Magelang.....	106
	e. Surat Keterangan Penelitian di SMAN 2 Magelang.....	107
	f. Surat Keterangan Penelitian di SMAN 3 Magelang	108
	g. Surat Keterangan Penelitian di SMAN 4 Magelang.....	109
	h. Surat Keterangan Penelitian di SMAN 5 Magelang.....	110
	i. Surat Keterangan Penelitian di SMAN 1 Muntilan.....	111
	j. Surat Keterangan Penelitian di SMAN 1 Kota Mungkid	112
	k. Surat Keterangan Penelitian di SMAN 1 Salaman.....	113
	l. Surat Keterangan Penelitian di SMAN 1 Mertoyudan.....	114
	m. Surat Keterangan Penelitian di SMAN 1 Bandongan.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan dalam bidang pendidikan suatu bangsa dapat menjadi gambaran bagi kemajuan bangsa tersebut. Dalam upaya meningkatkan hasil pendidikan baik dari segi kuantitas maupun kualitas, pemerintah menyiapkan berbagai perangkat baik berupa perundang-undangan maupun perangkat teknis.

Keberhasilan pendidikan sebenarnya bukan mutlak menjadi urusan pemerintah akan tetapi memerlukan peran serta yang nyata dari masyarakat. Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah menyiapkan berbagai pembenahan di sektor pendidikan untuk mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan beragam kebutuhan / keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat. (Depdiknas, 2004:8)

Dalam hal pengelolaan pendidikan, pemerintah selanjutnya mengalihkan kewenangan dalam hal keputusan, dari pemerintah Pusat/ Kanwil/ Kandep ke tingkat sekolah, dengan harapan sekolah dapat lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakat. Pengalihan wewenang ini selanjutnya dilakukan dengan pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Dengan demikian MBS dikembangkan dengan dasar otonomi atau kemandirian sekolah dalam menentukan arah, kebijakan, serta jalannya pendidikan di daerah masing-masing.

Dalam pelaksanaannya, disadari bahwa mengimplementasikan pemberian wewenang kepada sekolah melalui pendekatan MBS memerlukan proses dan waktu (Fattah 2004:1). Hal ini disebabkan selama ini sekolah hanya menerima berbagai program yang bersifat sentralistik (semuanya diatur oleh pusat), sehingga gamang dalam menerima kewenangan yang diberikan ketika era otonomi bergulir.

Keberhasilan dalam melaksanakan MBS sendiri sangat ditentukan oleh perwujudan kemandirian manajemen pendidikan pada tingkat Kabupaten atau Kota, yang ditandai dengan semakin meningkatnya partisipasi masyarakat, dengan mengakomodasi pandangan, aspirasi, dan menggali potensi yang ada di masyarakat untuk menjamin demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas dunia pendidikan.

Salah satu wujud dari partisipasi masyarakat dalam turut mendukung MBS adalah dengan membentuk Komite Sekolah pada setiap satuan pendidikan. Komite Sekolah merupakan wahana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan prakarsanya dalam upaya ikut serta meningkatkan mutu pendidikan.

Peran masyarakat melalui Komite Sekolah dalam memperbaiki kinerja sekolah merupakan suatu keharusan karena MBS dipandang sebagai suatu pendekatan praktis yang bertujuan mendesain pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah mencakup guru, kepala sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat

Mengingat fungsi Komite Sekolah sangat strategis dalam memperbaiki kinerja sekolah, semestinya dalam pembentukan atau pengangkatan anggota

Komite Sekolah ditetapkan suatu mekanisme yang jelas sehingga mampu memunculkan sosok anggota Komite Sekolah yang benar-benar dapat memberikan sumbangan positif bagi perbaikan kinerja sekolah. Dalam kenyataannya, mekanisme pembentukan Komite Sekolah atau pemilihan anggota Komite Sekolah diserahkan sepenuhnya pada sekolah masing-masing. Akibatnya tidak ada mekanisme baku. Sekolah yang unggul memiliki mekanisme berbeda dengan sekolah-sekolah yang termasuk kategori rendah. Sekolah yang unggul menetapkan berbagai kriteria yang ketat bagi pemilihan anggota komite, sementara sekolah yang termasuk kategori rendah, pembentukan Komite Sekolah tak lebih dari sekedar pelengkap sekolah dan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga keberadaannya relatif sekedar “tukang stempel” saja.

Karena mekanisme pembentukan dan pemilihan anggotanya diserahkan kepada sekolah masing-masing, maka anggota Komite Sekolah pada berbagai sekolah SMA di Kabupaten dan Kota Magelang menjadi relatif heterogen terutama tingkat pendidikannya. Ada anggota Komite yang berpendidikan SMP, SMA, Ahli madya, dan Sarjana. Menurut Sweeting (2003: <http://MBEproject.net>), pemilihan anggota Komite Sekolah di Probolinggo ternyata tidak memperhatikan tingkat pendidikan seseorang tetapi lebih pada jaringan kerja. Sedangkan menurut Setiani (2006: vii), tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja, karena pendidikan sebagai landasan dalam pengembangan diri dan kemampuan memanfaatkan semua sarana yang ada demi kelancaran dalam melaksanakan tugas yang diberikan/ dibebankan. Akibatnya, rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu penghambat

implementasi kebijakan baru, seperti MBS. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah : Bagaimana kinerja Komite Sekolah jika tingkat pendidikan anggotanya tidak diperhatikan dalam pemilihan anggotanya?

Persoalan yang tak kalah menarik adalah jika kinerja Komite Sekolah dikaitkan dengan pengetahuan anggota Komite Sekolah terhadap MBS. Pada bagian awal telah disampaikan bahwa pembentukan Komite Sekolah merupakan salah satu perwujudan dari partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu kinerja sekolah melalui pendekatan MBS. Jika anggota masyarakat yang tergabung dalam Komite Sekolah tidak mengetahui atau hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas mengenai apa itu MBS, dapatkah mereka memiliki kinerja yang baik dalam ikut mengelola sekolah ? Di Kabupaten dan Kota Magelang, kurangnya pengetahuan anggota Komite Sekolah mengenai MBS terutama disebabkan karena kurang tersosialisasinya MBS ke seluruh lapisan masyarakat.

Berpijak dari hal tersebut, peneliti mencoba mengadakan penelitian mengenai adakah pengaruh tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah bagi anggota Komite Sekolah terhadap kinerja Komite Sekolah SMA di Kota dan Kabupaten Magelang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat diidentifikasi berbagai masalah dalam kaitannya dengan MBS atau Komite Sekolah

1. Apakah kinerja Komite Sekolah mempengaruhi kualitas sekolah?
2. Apakah tingkat pengetahuan anggota mempengaruhi kinerja Komite Sekolah?
3. Apakah tingkat pengetahuan anggota Komite Sekolah mempengaruhi pelaksanaan MBS di sekolah ?
4. Apakah pemilihan anggota Komite Sekolah dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan?
5. Faktor-faktor apa yang menjadi kriteria dalam pemilihan anggota Komite Sekolah?
6. Apakah anggota Komite Sekolah memahami tugas dan kewajibannya ?
7. Apakah Komite Sekolah berperan aktif dalam memacu pelaksanaan MBS?
8. Apakah pembentukan Komite Sekolah sesuai dengan aturan yang ada?

Mungkin masih banyak lagi masalah yang akan muncul berkaitan dengan latar belakang dan tidak dapat saya tampilkan di sini.

C. Pembatasan Masalah

Agar dalam penelitian ini tidak lepas dari tujuan serta untuk menghindarkan timbulnya kemungkinan pembahasan dan penafsiran dengan judul dan permasalahan secara berbeda, maka penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut.

1. Penelitian ini hanya menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Komite Sekolah , yaitu tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dari anggota Komite Sekolah.
2. Penelitian ini menempatkan tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah sebagai dua faktor yang terpisah dan tidak saling mempengaruhi karena keduanya diperoleh dengan cara yang berbeda.
3. Penelitian ini tidak menempatkan kategori sekolah sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja Komite Sekolah dan sebaliknya.

D. Perumusan Masalah

Dari sekian banyak masalah yang terungkap dalam identifikasi masalah, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana hubungan antara tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah terhadap kinerja Komite Sekolah?
2. Bagaimana hubungan tingkat Pendidikan anggota Komite Sekolah terhadap kinerja Komite Sekolah?
3. Bagaimana hubungan antara pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah terhadap kinerja Komite Sekolah?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Hubungan tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah terhadap kinerja Komite Sekolah
2. Hubungan tingkat pendidikan anggota Komite Sekolah terhadap kinerja Komite Sekolah
3. Hubungan Pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah terhadap kinerja Komite Sekolah .

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Sebagai bahan masukan dalam rangka peningkatan kinerja Komite Sekolah.
2. Memperluas wawasan anggota Komite Sekolah, Kepala sekolah, guru, dan pihak terkait dalam melaksanakan MBS di sekolah.
3. Memberikan sumbangan pemikiran untuk meninjau berbagai faktor yang menunjang keberhasilan kerja atau kualitas kinerja Komite Sekolah.
4. Memperdalam pengetahuan tentang dukungan kinerja Komite Sekolah terhadap pelaksanaan MBS di sekolah.
5. Menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja Komite Sekolah.
6. Menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas sekolah dan pelaksanaan MBS.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Berbagai penelitian yang berkenaan dengan implementasi MBS, Komite Sekolah, pengaruh pengetahuan dan tingkat pendidikan terhadap kinerja dapat dilihat sebagai berikut.

Winoto melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SLTP Negeri 1 Pandaan Pasuruan”. Penelitian yang merupakan studi kasus ini bertujuan untuk mengetahui implementasi MBS terhadap peningkatan kualitas sekolah. Penelitian yang dilakukan difokuskan pada perencanaan, implementasi dan monitoring MBS. Penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen ini dapat diterapkan dengan berbagai penyesuaian (Winoto, 2003: www.um.ac.id).

Sukarno, Soewartoyo, dan Handayani (<http://www.lipi.org>) melakukan penelitian yang berjudul “Menuju Otonomi Pendidikan dan Otonomi di Daerah” yang bertujuan untuk mengetahui konsep tentang otonomi sekolah, program yang dicanangkan dan untuk menemukan kesamaan skenario di antara bermacam-macam skenario yang dicanangkan di berbagai sekolah dalam rangka menuju otonomi sekolah dalam kaitannya dengan MBS. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada kesamaan konsep secara teoretis mengenai otonomi sekolah antara pemerintah daerah dan masyarakat, yaitu suatu usaha meningkatkan mutu pendidikan, tetapi dalam pelaksanaannya menempatkan otonomi dalam kerangka yang berbeda. Pemerintah daerah menempatkan otonomi sebagai bentuk

kemandirian sekolah dalam menghadapi masyarakatnya, terutama dalam pengelolaan dana, sedangkan masyarakat mengartikan otonomi sebagai sekolah tanpa uang sekolah. Keadaan ini menempatkan sekolah dalam posisi yang terjepit.

Kedua penelitian di atas berdasarkan pada satu titik awal, yaitu perlunya penerapan MBS dalam rangka meningkatkan mutu sekolah dengan konsep otonomi. Kedua penelitian di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan MBS dapat diartikan berbeda-beda. Pelaksanaan di lapangan sangat tergantung bagaimana sekolah dan pihak-pihak terkait menerjemahkan konsep MBS ini. Kedua penelitian di atas mengisyaratkan perlunya pembenahan pelaksanaan MBS. Sebagai salah satu komponen MBS, tentu kinerja Komite Sekolah perlu dilihat apakah sudah mendukung pelaksanaan MBS dengan benar.

Penelitian yang dilakukan oleh Sweeting, dkk (2003) tentang peran Komite Sekolah menunjukkan hal-hal berikut.

1. Pengetahuan mengenai pendidikan, yang nampak dari tugas sehari-hari di dalam bidang pendidikan dan pengalaman sebagai anggota BP3, kelihatannya tidak menjadi faktor utama untuk menjadi pengurus. Kelihatannya, pengurus dipilih karena keterampilan-keterampilan mereka dan jaringan hubungan yang mereka miliki.
2. Hanya satu dari keempat peran Komite Sekolah yang dianggap sebagai kriteria keefektifan komite, yaitu mediator antara sekolah dan masyarakat. Bahkan pengumpulan dana, suatu kegiatan yang memerlukan pemikiran dan tenaga dari komite, tidak dianggap sebagai tanda keefektifan komite oleh sebagian besar dari responden.

3. Sebagian besar responden mengharapkan Komite Sekolah yang ideal di masa depan mempunyai peran yang lebih besar daripada perannya sekarang. Banyak yang menganggap bahwa lingkungan kerja yang bagus dan anggota yang berkualitas sangat penting, sehingga komite dapat bekerja secara efektif bersama-sama dengan sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu belajar mengajar.

Kedua penelitian di atas memberikan gambaran masih perlunya peningkatan kinerja Komite Sekolah. Komite Sekolah bukan hanya sebagai penarik dana masyarakat tetapi harus menjadi jembatan antara pemerintah, sekolah dan masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan.

Kinerja Komite Sekolah terbukti memiliki pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan MPMBS (Haryono, 2006:vii). Penelitian lain mengenai kinerja menunjukkan adanya hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dan kinerja. (<http://fisip.undip.ac.id/>). Penelitian yang senada dilakukan oleh Handayani (2004: <http://fisip.undip.ac.id/>) menunjukkan adanya pengaruh yang bermakna antara pelatihan dan pengalaman kerja terhadap produktivitas kerja (kinerja). Kedua penelitian dapat digeneralisasikan untuk memberikan dasar yang kuat adanya pengaruh tingkat pendidikan dan pengetahuan terhadap kinerja. Lebih lanjut penelitian yang dilakukan Setiani (2006:vii) tentang implementasi kebijakan MPMBS di Gugus 03 Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto. menemukan bahwa salah satu faktor penghambat implementasi kebijakan ini adalah rendahnya tingkat pendidikan. Hasil penelitian The British Council (2001) mengenai partisipasi dalam Komite Sekolah dan Badan Pembantu Penyelenggara

Pendidikan (BP3) menyimpulkan bahwa Ketua BP3 dan orang tua yang berpendidikan lebih tinggi ternyata lebih aktif dari koleganya yang berpendidikan lebih rendah.

Dari beberapa penelitian tersebut di atas, terlihat bahwa masalah-masalah seperti: pengaruh tingkat pendidikan anggota Komite Sekolah terhadap kinerja Komite Sekolah, pengaruh pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah terhadap kinerja Komite Sekolah belum diteliti. Jadi penelitian ini mengangkat sebagai masalah dalam penelitian

B. Kajian Teoretis

1. Kinerja

a. Definisi Kinerja

Robbins (1993:218) mendefinisikan kinerja sebagai fungsi dan interaksi antara kemampuan dan motivasi. Jika ada yang tidak memadai, kinerja akan dipengaruhi negatif. Dijelaskan lebih lanjut dalam kinerja selain motivasi ada beberapa hal yang harus juga dipertimbangkan yaitu kecerdasan dan ketrampilan untuk selanjutnya dipakai untuk menjelaskan dan menilai kinerja.

Manier dalam As'ad (1998:56) menyatakan bahwa kinerja adalah batasan prestasi kerja tentang kesuksesan seseorang dalam melaksanakan pekerjaan. Prestasi kerja merupakan hasil yang dicapai seseorang menurut kriteria yang berlaku terhadap pekerjaan yang bersangkutan. Orang yang prestasinya tinggi disebut orang yang produktif dan sebaliknya bila levelnya tidak mencapai standar dikatakan sebagai tidak produktif atau berprestasi rendah. Lebih

lanjut produktifitas atau hasil kerja dapat dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan. Manier dalam As'ad (1998:56) menjelaskan bahwa akan terjadi perbedaan kinerja antara orang yang satu dengan yang lainnya dalam situasi kerja karena perbedaan karakteristik dari individu yang bersangkutan. Di samping itu, orang yang sama dapat menghasilkan performance kerja yang berbeda dalam situasi yang berbeda pula.

Kinerja dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu :

- 1) individual, meliputi:
 - a) kemampuan dan keahlian (mental dan fisik)
 - b) latar belakang (keluarga, kelas sosial, pengalaman)
 - c) demografi (Usia, Ras, Jenis Kelamin)
- 2) psikologis, meliputi:
 - a) persepsi
 - b) *attitude*
 - c) *personality*
 - d) pembelajaran
 - e) motivasi
- 3) organisasi, meliputi:
 - a) sumber daya
 - b) kepemimpinan
 - c) penghargaan
 - d) struktur
 - e) *job design* (As'ad, 1998:56)

b. Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja memainkan peranan yang sangat penting dalam peningkatan motivasi di tempat kerja. Pegawai, dalam hal ini anggota Komite Sekolah, menginginkan dan memerlukan umpan balik berkenaan dengan prestasi mereka dan penilaian menyediakan kesempatan untuk memberikan balikan kepada mereka. Jika kinerja tidak sesuai dengan standar, maka penilaian memberikan kesempatan untuk meninjau kemajuan pegawai untuk menyusun rencana peningkatan kinerja (Dessler dalam Sunarno, 2005:66).

Penilaian kinerja pegawai menyangkut berbagai bidang seperti kemampuan kerja, kerajinan, disiplin, hubungan kerja atau hal-hal khusus sesuai dengan bidang dan tingkat pekerjaan yang dijabatnya. Dessler (dalam Sunarno 2005:66) menyebutkan lima faktor populer yang dapat dijadikan penilaian kinerja, yaitu :

- 1) kualitas pekerjaan, meliputi : akurasi, ketelitian, penampilan, dan penerimaan keluaran.
- 2) kuantitas pekerjaan, meliputi : volume keluaran dan kontribusi.
- 3) supervisi yang diperlukan, meliputi : perlu tidaknya saran, arahan, atau perbaikan.
- 4) kehadiran, meliputi : keteraturan, dapat dipercayai atau diandalkan, dan ketepatan waktu.
- 5) konservasi, meliputi : pencegahan pemborosan, kerusakan, pemeliharaan peralatan.

Dalam penilaian kinerja yang efektif setidaknya terdapat dua syarat utama yang harus diperhatikan, yaitu :

- 1) adanya kriteria kinerja yang dapat diukur secara objektif
- 2) adanya obyektivitas dalam proses evaluasi.

Kriteria kinerja yang dapat diukur secara objektif untuk pengembangannya diperlukan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Ada tiga kualifikasi dalam pengembangan kriteria kinerja yang dapat diukur secara objektif, yaitu :

a) relevansi (*relevancy*)

Relevansi menunjukkan tingkat kesesuaian antara kriteria dengan tujuan-tujuan kinerja. Misalnya kecepatan produksi dapat menjadi ukuran kinerja yang lebih relevan dibandingkan penampilan seseorang.

b) reliabilitas (*reability*)

Reliabilitas menunjukkan tingkat konsistensi kriteria. Kriteria yang objektif berarti tidak tergantung pada pengukur, orang yang diukur dan kondisi pengukuran.

c) diskriminasi (*discrimination*)

Diskriminasi mengukur tingkat pembeda kriteria kinerja dalam memperlihatkan perbedaan-perbedaan dalam kinerja. Jika nilai semuanya cenderung menunjukkan semuanya baik atau jelek berarti ukuran kinerja tidak bersifat diskriminatif, tidak membedakan kinerja di antara pegawai.

2. Komite Sekolah dan Penilaian Kinerja Komite Sekolah

Komite Sekolah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 56 ayat 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan

pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Komite Sekolah berkedudukan di: a) satu satuan pendidikan tertentu, b) beberapa satuan pendidikan sekolah yang sejenis yang berada di kompleks atau kawasan yang berdekatan, c) beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenis dan jenjang pendidikannya serta terletak di kompleks atau kawasan yang berdekatan, dan d) beberapa satuan pendidikan yang sama di kawasan yang berdekatan milik atau dalam pembinaan satu yayasan penyelenggara pendidikan (Depdiknas, 2004: 1).

Kepengurusan dan keanggotaan Komite Sekolah dapat berasal dari elemen masyarakat berikut.

- a. perwakilan orang tua/wali peserta didik
- b. tokoh masyarakat
- c. anggota masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pendidikan
- d. pejabat pemerintah setempat
- e. dunia usaha dan dunia industri (DUDI)
- f. pakar pendidikan yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan
- g. organisasi profesi tenaga kependidikan
- h. perwakilan siswa, dan atau
- i. perwakilan alumni untuk KS dan perwakilan Komite Sekolah yang disepakati

(Depdiknas, 2004: 24)

Komite Sekolah memiliki tujuan sebagai berikut.

- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan (di daerah kabupaten/kota untuk Dewan Pendidikan, satuan pendidikan untuk Komite Sekolah)
- b. meningkatkan tanggung jawab dari peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan di satuan pendidikan
- c. menciptakan suasana dan kondisi transparansi, akuntabel, dari demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu

Komponen dan indikator kinerja Komite Sekolah terkait pada peran yang dilakukannya, yakni sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*), pendukung (*supporting agency*), pengawas (*controlling agency*), dan badan mediator (*mediator agency*).

- a. Komite Sekolah sebagai Badan Pertimbangan (*Advisory agency*)

Komite Sekolah dalam fungsi perencanaan memiliki peran mengidentifikasi sumber daya pendidikan di sekolah serta memberikan masukan dan pertimbangan dalam menetapkan RAPBS, termasuk dalam penyelenggaraan rapat RAPBS.

Komite Sekolah sebagai badan penasihat berperan penting dalam memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan proses pengelolaan pendidikan di sekolah, termasuk proses pembelajarannya. Hal ini penting, sebab dengan berlakunya otonomi pendidikan dengan pengelolaan pendidikan yang lebih

otonom di sekolah, guru memiliki peran yang penting dalam penciptaan proses pembelajaran yang kondusif bagi sarana demokratisasi pendidikan.

Komite Sekolah dalam fungsinya sebagai badan penasihat bagi sekolah, dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya pendidikan antara lain berperan mengidentifikasi berbagai potensi sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat. Fungsi ini akan dapat berguna dalam memberikan pertimbangan mengenai sumber daya pendidikan yang ada dalam masyarakat yang dapat diperbantukan di sekolah.

b. Komite Sekolah sebagai Badan Pendukung (*Supporting agency*)

Dengan koordinasi dari Dewan Pendidikan, Komite Sekolah diharapkan dapat memberi gambaran yang utuh mengenai persoalan yang terjadi di sekolah, yang kemudian dapat ditindak lanjuti dengan memberdayakan guru sukarelawan, termasuk tenaga kependidikan non-guru, di sekolah yang masih menghadapi persoalan dalam kekurangan tenaga kependidikan.

Komite Sekolah berfungsi memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Tahap selanjutnya, tentu Komite Sekolah akan memberdayakan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan di sekolah melalui sumber daya yang ada pada masyarakat, dengan berkoordinasi dengan Dewan Pendidikan. Memberdayakan bantuan sarana dan prasarana yang telah dilakukan Komite Sekolah dengan koordinasi pada Dewan Pendidikan akan dipantau perkembangannya melalui evaluasi pelaksanaan dukungan atau bantuan tersebut.

Harus diakui, anggaran pendidikan yang pada pemerintah (daerah) sangat terbatas. Karena itu pemanfaatan sumber-sumber anggaran pendidikan yang ada pada masyarakat menjadi kebutuhan yang mendesak. Dalam era otonomi pendidikan yang meletakkan otonomi sekolah sebagai hal yang terpenting, sekolah harus merupakan bagian yang terpenting dari masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kepedulian dan rasa memiliki terhadap sekolah.

c. Komite Sekolah sebagai Badan Pengontrol (*Controlling agency*)

Bagian yang terpenting dalam manajemen adalah controlling. Berkaitan dengan pengembangan kinerja ini, perlu dilihat sejauh mana peran pengontrol yang dilakukan Komite Sekolah berjalan dengan optimal terhadap pelaksanaan pendidikan. Beberapa fungsi yang dapat dilakukan Komite Sekolah dalam hubungannya dengan perannya sebagai badan pengontrol terhadap perencanaan pendidikan antara lain: melakukan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan di lingkungan Dinas Pendidikan, termasuk penilaian terhadap kualitas kebijakan yang ada. Dewan Pendidikan juga dapat melakukan fungsi kontrol terhadap proses perencanaan, termasuk kualitas perencanaan pendidikan. Komite Sekolah juga dapat melakukan fungsi yang sama seperti yang dilakukan Dewan Pendidikan, yaitu: melakukan kontrol terhadap proses pengambilan keputusan dan perencanaan pendidikan di sekolah, termasuk kualitas kebijakan yang ada.

Fungsi Dewan Pendidikan dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program pendidikan adalah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program yang ada pada Dinas Pendidikan, apakah sesuai dengan

kebijakan yang disusun. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan program tersebut adalah bagaimana alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program dilakukan Dinas Pendidikan. Dalam pengembangan kinerja ini, perlu dilihat sejauh mana Dewan Pendidikan melakukan fungsinya dalam mengontrol alokasi dana dan sumber-sumber daya tersebut.

Komite Sekolah dalam hal ini juga dapat melakukan fungsi yang sama dengan Dewan Pendidikan. Hal yang menjadi perbedaan adalah objek yang diamati. Komite Sekolah dalam hal ini mengontrol pelaksanaan program di sekolah, di samping alokasi dana dan sumber-sumber daya bagi pelaksanaan program tersebut.

Penuntasan program wajib belajar 9 tahun akan menjadi komitmen bagi seluruh daerah. Karena itu, para pengambil kebijakan di bidang pendidikan tentu telah membuat berbagai kebijakan dan program dalam mencapai program tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan bagi anak umur 6-15 tahun. Berbagai upaya pemerataan dan perluasan tersebut tentu bukan tanpa halangan, sebab persoalan seperti meningkatnya angka mengulang dan bertahan akan menjadi hal yang serius yang butuh penanganannya, yang akan berakibat pada keluaran pendidikan.

Dewan Pendidikan sebagai badan kontrol dalam hal ini adalah melakukan penilaian terhadap angka partisipasi, mengulang, bertahan, transisi pendidikan di daerah. Hal ini penting sebab penilaian ini akan mampu menjadi evaluasi bagi keberhasilan program wajib belajar 9 tahun. Hasil penilaian sendiri merupakan masukan bagi para pengambil kebijakan dalam rangka

penyempurnaan kebijakan dan program dalam rangka peningkatan angka keluaran pendidikan.

Program penuntasan wajib belajar 9 tahun juga tidak mengesampingkan mutu pendidikan. Sementara ini yang menjadi ukuran keberhasilannya adalah nilai pada ujian akhir. Dalam kaitannya dengan ini, Dewan Pendidikan memiliki peran yang penting dalam melakukan pemantauan terhadap penilaian terhadap hasil ujian akhir.

Fungsi kontrol Dewan Pendidikan ini dilakukan melalui bentuk koordinasi dengan Komite Sekolah, karena penilaian terhadap hasil keluaran pendidikan di sekolah-sekolah yang dilakukan oleh Komite Sekolah tersebut akan menjadi masukan bagi Dewan Pendidikan memetakan persoalan dalam pemerataan dan mutu keluaran pendidikan.

d. Komite Sekolah sebagai Mediator (*Mediator agency*)

Komite Sekolah dapat berfungsi sebagai mediator dan menjadi penghubung Sekolah dengan masyarakat, atau antara sekolah dengan Dinas Pendidikan. Berbagai persoalan yang sering dialami orang tua dalam pelaksanaan pendidikan anak-anaknya di sekolah misalnya sering kali terbentur pada sebatas keluhan, kurang direspons sekolah. Karena itu, kehadiran Komite Sekolah pada posisi ini sangat penting dalam mengurangi berbagai keluhan orang tua tersebut.

Peran sebagai mediator yang dilakukan Dewan Pendidikan dalam pelaksanaan program pendidikan lebih kepada upaya memfasilitasi berbagai masukan dari masyarakat terhadap kebijakan dan program pendidikan yang

ditetapkan Dinas Pendidikan. Peran ini adalah antara lain dengan mengkomunikasikan berbagai pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap instansi terkait dalam bidang pendidikan. Masukan ini tentu akan menjadi perhatian bagi pengambil kebijakan, yang selanjutnya akan dilakukan perbaikan bagi kebijakan dan program pendidikan. Bagi Dewan Pendidikan, hasil penyempurnaan kebijakan dan program tersebut juga harus disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga terjadi umpan balik bagi keberhasilan pelaksanaan pendidikan di daerah.

Peran ini juga dapat dilakukan oleh Komite Sekolah sebagai mediator dalam pelaksanaan program sekolah, sehingga berbagai kebijakan dan program yang telah ditetapkan sekolah dapat akuntabel kepada masyarakat.

Bagi Komite Sekolah, peran yang harus dijalankan sebagai mediator adalah memberdayakan sumber daya yang ada pada orang tua bagi pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Lebih ringkas, peran dan fungsi Komite Sekolah dapat dilihat pada table

1. table ini juga memuat penjabarannya dalam kegiatan operasional

Tabel 1. Penjabaran Peran Komite Sekolah ke dalam Fungsi Komite Sekolah dan Kegiatan Operasionalnya

No	Peran Komite Sekolah	Fungsi Komite Sekolah	Kegiatan Operasional
1.	Pemberi pertimbangan (<i>advisory</i>)	1.1. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: a) kebijakan dan	a. mengadakan pendataan kondisi social ekonomi keluarga peserta didik dan sumber daya pendidikan dalam masyarakat b. menganalisis hasil pendataan sebagai bahan

		<p>program pendidikan</p> <p>b) RAPBS,</p> <p>c) kriteria kinerja satuan pendidikan,</p> <p>d) kriteria tenaga kependidikan,</p> <p>e) kriteria fasilitas pendidikan, dan f) hal – hal lain yang terkait dengan pendidikan</p>	<p>pemberian masukan, pertimbangan, dan atau rekomendasi kepada sekolah</p> <p>c. menyampaikan masukan pertimbangan dan atau rekomendasi secara tertulis kepada sekolah dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan dan Dewn Pendidikan</p> <p>d. memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan kurikulum muatan local</p> <p>e. memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran yang menyenangkan (PAKEM)</p> <p>f. memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan kegiatan sekolah</p>
2.	Pendukung (<i>supporting</i>)	2.1 mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan	<p>a. mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala dan insidental dengan orangtua dan anggota masyarakat</p> <p>b. mencari bantuan dana dari dunia usaha dan industri untuk biaya pembebasan uang sekolah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu</p> <p>c. mengimbau dan mengadakan pendekatan kepada orang tua dan masyarakat yang dipandang mampu untuk dapat menjadi narasumber dalam kegiatan intrakurikuler bagi peserta didik</p> <p>d. memberikan dukungan untuk pemeriksaan</p>

		<p>kesehatan anak – anak</p> <p>e. memberikan dukungan kepada sekolah untuk secara preventif dan kuratif dalam memberantas penyebarluasan narkoba di sekolah</p> <p>f. memberikan dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah</p>
	2.2. menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggara pendidikan	<p>a. memverifikasi RAPBS yang diajukan oleh kepala sekolah</p> <p>b. memberikan pengesahan terhadap RAPBS setelah proses verifikasi dalam rapat pleno KS</p> <p>c. memotivasi masyarakat kalangan menengah ke atas untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah</p> <p>d. membantu sekolah dalam rangka penggalangan dana masyarakat untuk pengumpulan dana abadi</p>
	2.3. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu	<p>a. melaksanakan konsep subsidi silang dalam penarikan iuran dari orang tua siswa</p> <p>b. mengadakan kegiatan inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat, misalnya panggung hiburan untuk sekolah dan masyarakat</p> <p>c. membantu sekolah dalam menciptakan hubungan kerjasama antara sekolah dengan orangtua dan masyarakat</p>

3.	Pengontrolan	3.1 melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> a. mengadakan rapat atau pertemuan secara rutin atau insidental dengan kepala sekolah dan dewan guru b. mengadakan kunjungan atau silaturahmi ke sekolah atau dewan guru c. meminta penjelasan kepada sekolah tentang hasil belajar siswa d. bekerjasama dalam kegiatan penelusuran alumni
4.	Mediator	4.1. melakukan kerjasama dengan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stakeholder pendidikan, khususnya dengan DUDI b. mengadakan penjajagan tentang kemungkinan penjalinan kerjasama atau MOU dengan lembaga lain untuk memajukan sekolah
		4.2. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran, dan ide kreatif dari masyarakat b. menyampaikan laporan kepada sekolah secara tertulis, tentang hasil pengamatannya terhadap sekolah

(Sumber: Kepmendiknas Nomor 44/U/2002)

Kegiatan operasional dari setiap peran dan fungsi Komite Sekolah ini selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja Komite Sekolah. Faktor-faktor penilaian kinerja, yaitu kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, supervisi yang diperlukan, kehadiran, dan konservasi yang tercakup dalam kegiatan operasional dapat dilihat pada tabel 2. Beberapa kegiatan operasional dapat dimungkinkan mencakup lebih dari satu faktor secara bersamaan. Misalnya, kegiatan rapat atau pertemuan secara berkala dan insidental dengan orangtua dan anggota masyarakat

selain ditinjau dari faktor kehadiran juga kuantitas. Kehadiran ditinjau dari hadirnya anggota Komite Sekolah dalam rapat tersebut dan kuantitas ditinjau dari berapa kali rapat diadakan dan berapa kali anggota Komite Sekolah hadir.

Tabel 2. Matrik Hubungan Kegiatan Operasional Komite Sekolah dan Faktor Penilaian Kinerja

Kegiatan Operasional	Faktor				
	1	2	3	4	5
1.1.a. Mengadakan pendataan kondisi social ekonomi keluarga peserta didik dan sumber daya pendidikan dalam masyarakat		X			
1.1.b. menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan, dan atau rekomendasi kepada sekolah	X				
1.1.c. menyampaikan masukan pertimbangan dan atau rekomendasi secara tertulis kepada sekolah dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan dan Dewn Pendidikan			X		
1.1.d. memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan kurikulum muatan local			X		
1.1.e. memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran yang menyenangkan (PAKEM)			X		
1.1.f. memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan kegiatan sekolah			X		
2.1.a. mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala dan incidental dengan orangtua dan anggota masyarakat		X		X	
2.1.b. mencari bantuan dana dari dunia usaha dan industri untuk biaya pembebasan uang sekolah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu		X			
2.1.c. mengimbau dan mengadakan pendekatan kepada orang tua dan masyarakat yang dipandang mampu untuk dapat menjadi narasumber dalam kegiatan intrakurikuler bagi peserta didik	X				
2.1.d. memberikan dukungan untuk pemeriksaan kesehatan anak – anak	X				
2.1.e. memberikan dukungan kepada sekolah untuk secara preventif dan kuratif dalam memberantas penyebaran narkoba di sekolah	X				

2.1.f. memberikan dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah	X				X
2.2.a.memverifikasi RAPBS yang diajukan oleh kepala sekolah			X		
2.2.b.memberikan pengesahan terhadap RAPBS setelah proses verifikasi dalam rapat pleno KS			X		
2.2.c.memotivasi masyarakat kalangan menengah ke atas untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah	X				
2.2.d.membantu sekolah dalam rangka penggalangan dana masyarakat untuk pengumpulan dana abadi	X				X
2.3.a.melaksanakan konsep subsidi silang dalam penarikan iuran dari orang tua siswa		X			
2.3.b.mengadakan kegiatan inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat, misalnya panggung hiburan untuk sekolah dan masyarakat		X			X
2.3.c.membantu sekolah dalam menciptakan hubungan kerjasama antara sekolah dengan orangtua dan masyarakat	X				
3.1.a.mengadakan rapat atau pertemuan secara rutin atau incidental dengan kepala sekolah dan dewan guru				X	
3.1.b. mengadakan kunjungan atau silaturahmi ke sekolah atau dewan guru	X			X	
3.1.c. meminta penjelasan kepada sekolah tentang hasil belajar siswa			X		
3.1.d. bekerjasama dalam kegiatan penelusuran alumni	X	X			
4.1.a. membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stakeholder pendidikan, khususnya dengan DUDI	X	X			
4.1.b. mengadakan penjajagan tentang kemungkinan penjalinan kerjasama atau MOU dengan lembaga lain untuk memajukan sekolah	X	X			
4.2.a. menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran, dan ide kreatif dari masyarakat		X			
4.2.b. menyampaikan laporan kepada sekolah secara tertulis, tentang hasil pengamatannya terhadap sekolah		X		X	

Keterangan: Faktor 1: kualitas, 2: kuantitas, 3: supervisi, 4: kehadiran, 5: konservasi

Komite Sekolah yang telah dilaksanakan bukan tanpa kritik dan kontroversi. Komite Sekolah menjadi sebuah lembaga baru yang ada di tengah-tengah sekolah, meskipun sebenarnya beberapa fungsinya telah lama mengakar dalam sistem persekolahan kita. Tidak hanya masih tidak jelasnya fungsi Komite Sekolah bagi warga sekolah dan masyarakat akan tetapi lembaga ini juga dianggap membawa masalah baru lainnya. Lebih ekstrim, Komite Sekolah hanya dianggap sebagai satu persyaratan sekolah telah menjalankan MBS sehingga perannya telah jauh dianggap menjadi aktor utama di balik mahalnnya biaya sekolah. Keberadaannya sekadar "menstempel" setiap kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah, terutama untuk menarik dana dari orangtua siswa, peran ini telah melekat pada BP3 di masa lalu (Irawan, 2004; Mardiyono, 2004; Solihudien, 2005).

Sangat disadari bahwa ketidaktepatan fungsi Komite Sekolah ini disebabkan oleh beberapa hal.

- a. Kurangnya sosialisasi baik dari segi media maupun jalur sosialisasi. Jalur yang digunakan oleh pemerintah dalam mensosialisasi program ini adalah televisi dan birokrasi. Penggunaan jalur birokrasi menyebabkan informasi justru terhenti dan sekedar pelaksanaan proyek. Masyarakat sebagai tujuan utama dari pembentukan komite menjadi tidak tergarap. Ketidakpedulian masyarakat terhadap apa dan bagaimana yang terjadi dengan sekolah tidak

tergerak baik (Admadipura, 2003; Irawan, 2004; Mardiyono, 2004; Solihudien, 2005)

- b. Kurangnya pemahaman guru dan orang tua siswa tentang fungsi komite hal ini merupakan akibat lanjutan dari kurangnya sosialisasi dari kebijakan baru (Irawan, 2004).
- c. Pembentukan yang diinisiasi oleh kepala sekolah akibat kurangnya kesadaran guru dan orang tua siswa terhadap Komite Sekolah. Komite Sekolah dibentuk agar dianggap telah menjalankan program pemerintah sehingga tidak ada tekanan dari dinas yang telah mewajibkan keberadaan komite di sekolah. Akibat dari keadaan ini ada beberapa kemungkinan. Pertama, Komite Sekolah hanya sekedar pergantian nama dari BP3, keanggotaan dan fungsinya hampir tidak berubah. Kedua, ada kecenderungan anggota Komite Sekolah yang dipilih merupakan orang yang punya jabatan dan hidup mapan, sehingga secara finansial tidak kesulitan atau tidak terlalu peduli. Waktu mereka untuk bekerja sebagai anggota komite juga terbatas. Ketiga, anggota Komite Sekolah dipilih dari antara orangtua murid yang anaknya menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Akibatnya, anggota Komite Sekolah enggan atau tak mampu menjalankan fungsi kontrolnya (Irawan, 2004; Rosyidi, 2005)
- d. Hal yang paling mendasar adalah filosofi Komite Sekolah sendiri masih simpang siur antara demokratisasi dan privatisasi sekolah (Irawan, 2004). Peran Komite Sekolah sebagai pengontrol kebijakan sekolah tidak dapat berkembang dengan baik. Demokratisasi sekolah yang diimani oleh peran ini menjadi kabur. Hal ini dipicu juga oleh keengganan masyarakat untuk

menyampaikan kritik bahkan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan di sekolah. Peran Komite Sekolah yang justru paling menonjol adalah sebagai pengumpul dana baik dari orang tua siswa maupun sumber lain. Hal ini lebih mengarah pada privatisasi sekolah.

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Lebih khusus, pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Tujuan pokok pendidikan adalah membentuk manusia-manusia yang baik, berbudaya, maupun berkeahlian dalam salah satu cabang pengetahuan. Berbudaya berarti mempunyai wawasan yang luas, orang yang berbudaya mempunyai kepekaan dan keterbukaan akan keindahan dan perasaan nilai-nilai manusiawi. Lebih jauh pendidikan merupakan usaha membelajarkan penguasaan seni untuk menggunakan pengetahuan (Sudarminta, 2005: 14). Dalam sejarah, pendidikan sering digunakan sebagai alat pemerintah untuk menekankan status quo, membela politik pemerintah, dan hanya diberikan pada kelas atas. Pendidikan sering dikatakan sebagai pemerkuat sistem yang ada, terlebih sistem pemerintah.

Sekarang, pendidikan harus ditujukan untuk memanusiakan manusia. Pendidikan bukan hanya membuka mata terhadap ketidakadilan tetapi harus dapat mengurangi ketidakadilan dan kemiskinan (Suparno, 2005: 126).

Supratiknya (2005:179) menyampaikan segi praktis pendidikan, yaitu maksud utama diselenggarakannya pendidikan adalah menghasilkan perubahan-perubahan yang positif di dalam diri peserta didik sehingga mereka mampu tumbuh dan berkembang menjadi pribadi dan warga masyarakat yang efektif. Substansi, yaitu ciri-ciri atau kemampuan yang harus ditumbuhkan dalam peserta didik sebagai tujuan pendidikan ditentukan oleh jenis dan jenjang pendidikan yang pada akhirnya juga sangat dipengaruhi oleh tuntutan perkembangan masyarakat. Jadi, tujuan pendidikan dasar secara substansial berbeda dengan tujuan pendidikan menengah dan juga berbeda dengan tujuan pendidikan tinggi. Pada jenjang tinggi sendiri pun tujuan pendidikan tersebut akan berlainan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Pada masing-masing jenjang pendidikan, segi-segi tertentu dari substansi tujuan pendidikan akan berlainan dari zaman ke zaman sesuai dengan perkembangan ilmu-teknologi dari masyarakat. Hal ini merupakan inti persoalan relevansi pendidikan, yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dan kenyataan kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU RI 20, 2003). Tujuan ini mulai diarahkan pada sejumlah visi baru yang dimaksudkan untuk menghadapi tantangan baru di era globalisasi pada milenium baru ini. Misalnya, tuntutan terhadap dikembangkannya seperangkat kemampuan atau keeterampilan baru dalam peserta didik. Keterampilan baru tersebut digolongkan menjadi tiga, yaitu: 1) *hard skill*, meliputi penguasaan dasar-dasar matematika, keterampilan memecahkan masalah dan kemampuan membaca cepat, 2) *soft skills*, meliputi kemampuan bekerja sama dalam kelompok serta kemampuan menyampaikan gagasan dengan jernih baik secara lisan maupun tertulis, dan 3) *computer literacy*, yaitu kemampuan memahami bahasa komputer setidak-tidaknya yang paling sederhana. Visi lain menekankan pentingnya menumbuhkan kemampuan dalam diri peserta didik untuk meningkatkan kualitas pribadi hingga ke kelas dunia. Kemampuan ini meliputi: 1) penguasaan pengetahuan dan gagasan mutakhir yang terbaik, 2) kemampuan kerja dengan standar paling tinggi dalam berbagai pekerjaan dan berbagai tempat, dan 3) kemampuan menjalin hubungan dan akses terhadap berbagai sumber yang ada di dunia baik secara perseorangan maupun kelembagaan (Hendrojuwono dalam Supratiknya, 2005: 182).

Pendidikan juga diharapkan dapat memenuhi visi dari UNESCO yang memuat nilai-nilai sekaligus merupakan sasaran praktik pendidikan. Visi dasar baru tersebut mencakup lima tujuan pendidikan, yaitu: 1) *learning how to think* atau belajar bagaimana berpikir, yaitu kemampuan menumbuhkan rasionalitas serta kemampuan dan keberanian untuk bersikap kritis dan mandiri, 2) *learning*

how to do atau belajar hidup, yaitu keterampilan dalam keseharian hidup termasuk kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi secara pribadi, 3) *learning to be* atau belajar menjadi diri sendiri, yaitu kemampuan untuk tumbuh dan berkembang sebagai pribadi mandiri dan penuh rasa harga diri, 4) *learning how to learn* atau belajar bagaimana belajar, yaitu mengembangkan sikap-sikap yang kondusif untuk belajar seumur hidup, seperti sikap kreatif, eksploratif dan imajinatif, 5) *learning to live together*, atau belajar hidup bersama dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya, yaitu pembentukan kesadaran bahwa kita hidup bersama orang lain, penanaman tanggung jawab atas kelestarian lingkungan, pengembangan sikap toleransi, cinta damai dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Berbagai kompetensi yang merupakan isi atau substansi tujuan pendidikan menurut visi baru ini juga merupakan kemampuan-kemampuan generik yang perlu dikuasai oleh seluruh peserta didik pada berbagai jenjang pendidikan menurut taraf perkembangan masing-masing. Rumusan tujuan pendidikan seperti yang disampaikan oleh UNESCO ini cukup spesifik, langsung menunjuk pada kompetensi khusus dan terkait dengan tuntutan kehidupan sehari-hari pula. Rumusan semacam ini akan membantu pendidik dan tenaga kependidikan memilih dan mengembangkan aneka sasaran dan strategi pembelajaran sehingga peningkatan mutu pendidikan sekolah kita di berbagai jenjang akan lebih mudah diupayakan (Supratiknya, 2005:182)

Definisi dan fungsi pendidikan di atas sangat luas dan ideal. Definisi di atas menyangkut berbagai jalur pendidikan baik formal, informal maupun non formal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang

terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Tingkat pendidikan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dimiliki oleh anggota Komite Sekolah. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

Jenjang pendidikan formal, meskipun bukan satu-satunya yang mempengaruhi perkembangan manusia akan tetapi pendidikan formal telah menjadi *locus primus*, pengarah utama, untuk tumbuh dan berkembangnya anak manusia secara utuh dalam peradaban modern ini (Glesson dalam Supratiknyo, 2005: 177-178). Sejalan dengan pemikiran Suparno (2005:125) yang menyebutkan bahwa pendidikan akan mencerdaskan bangsa dan orang akan membuka mata terhadap segala macam persoalan yang ada, orang yang kurang berpendidikan akan tidak tahu atau tidak sadar, bahkan tidak akan sadar bila diperlakukan tidak adil atau haknya dikurangi atau digerogeti. Pendidikan akan membantu seseorang sadar akan ketidakadilan

Jenjang pendidikan ini harus dilewati secara berurutan. Ada tahapan perkembangan yang telah dilalui untuk menuju jenjang berikutnya. Berdasarkan Undang-undang No. 20 Tahun 2003, pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah (pasal 17 ayat 1).

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar (pasal 18 ayat 2). Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi (pasal 19 ayat 1).

Sebagaimana telah disebutkan di atas, setiap jenjang memiliki tujuan dan kemampuan yang dikembangkan yang berbeda. Lulusan dari Sekolah Dasar diharuskan memiliki kemampuan sebagai berikut.

- a. Menjalankan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan anak
- b. Mengenal kekurangan dan kelebihan diri sendiri
- c. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungannya
- d. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi di lingkungan sekitarnya
- e. Menggunakan informasi tentang lingkungan sekitar secara logis, kritis, dan kreatif
- f. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif, dengan bimbingan guru/pendidik
- g. Menunjukkan rasa keingintahuan yang tinggi dan menyadari potensinya
- h. Menunjukkan kemampuan memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari

- i. Menunjukkan kemampuan mengenali gejala alam dan sosial di lingkungan sekitar
- j. Menunjukkan kecintaan dan kepedulian terhadap lingkungan
- k. Menunjukkan kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa, negara, dan tanah air Indonesia
- l. Menunjukkan kemampuan untuk melakukan kegiatan seni dan budaya lokal
- m. Menunjukkan kebiasaan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang
- n. Berkomunikasi secara jelas dan santun
- o. Bekerja sama dalam kelompok, tolong-menolong, dan menjaga diri sendiri dalam lingkungan keluarga dan teman sebaya
- p. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis
- q. Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung (Depdiknas, 2006: 2 – 3)

Lulusan dari Sekolah Menengah Pertama diharuskan memiliki kemampuan sebagai berikut.

- a. Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap perkembangan remaja
- b. Memahami kekurangan dan kelebihan diri sendiri
- c. Menunjukkan sikap percaya diri
- d. Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan yang lebih luas

- e. Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup nasional
- f. Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif
- g. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif
- h. Menunjukkan kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang dimilikinya
- i. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari
- j. Mendeskripsi gejala alam dan sosial
- k. Memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab
- l. Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
- m. Menghargai karya seni dan budaya nasional
- n. Menghargai tugas pekerjaan dan memiliki kemampuan untuk berkarya
- o. Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan waktu luang
- p. Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan santun
- q. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat

- r. Menghargai adanya perbedaan pendapat
- s. Menunjukkan kegemaran membaca dan menulis naskah pendek sederhana
- t. Menunjukkan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sederhana
- u. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan menengah (Depdiknas, 2006: 3 – 4).

Lulusan dari Sekolah Menengah Atas diharuskan memiliki kemampuan sebagai berikut.

- a. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan perkembangan remaja
- b. Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya
- c. Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya
- d. Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial
- e. Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan sosial ekonomi dalam lingkup global
- f. Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, kritis, kreatif, dan inovatif
- g. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan

- h. Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk pemberdayaan diri
- i. Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang terbaik
- j. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah kompleks
- k. Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial
- l. Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab
- m. Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- n. Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya
- o. Mengapresiasi karya seni dan budaya
- p. Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok
- q. Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta kebersihan lingkungan
- r. Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun
- s. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di masyarakat
- t. Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain
- u. Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara sistematis dan estetis

- v. Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Indonesia dan Inggris
- w. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan tinggi (Depdiknas, 2006: 4 – 5)

Perbedaan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan sekolah dasar dan menengah tidak hanya terletak pada segi kuantitasnya. Perbedaan juga terletak pada kualitasnya. Sekolah dasar lebih menekankan pada peletakan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, ahlak mulia, serta keterampilan hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sekolah menengah bertujuan untuk mengembangkan atau meningkatkan dasar yang telah diperoleh di sekolah dasar dan mempersiapkannya untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut (PP RI No 19 Tahun 2005 pasal 26).

Kemampuan yang dikembangkan di perguruan tinggi sendiri berbeda-beda, tergantung pada perguruan tinggi masing-masing. Akan tetapi secara umum, jenjang pendidikan tinggi lebih mengarah pada persiapan menjadi anggota masyarakat yang berahlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan (PP RI No 19 Tahun 2005 pasal 26). Berdasarkan uraian ini jelas bahwa, semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang akan semakin luas pula kemampuan yang dikembangkannya.

4. Pengetahuan tentang Manajemen Berbasis Sekolah

Pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengetahuan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan MBS. Pengetahuan ini meliputi latar belakang, definisi, tujuan, dan implementasinya. Penjelasan mengenai pengetahuan ini, selanjutnya dapat dipaparkan sebagai berikut.

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan yang dapat memberikan harapan dan kemungkinan yang lebih baik di masa mendatang, telah mendorong berbagai upaya dan perhatian seluruh lapisan masyarakat terhadap setiap gerak langkah dan perkembangan dunia pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas hidup manusia, pada intinya bertujuan untuk memajukan manusia, mendewasakan, serta merubah perilaku, serta meningkatkan kualitas menjadi lebih baik.

Pada kenyataannya pendidikan bukanlah suatu upaya yang sederhana, melainkan suatu kegiatan yang dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan akan selalu berubah seiring dengan perubahan jaman, setiap saat pendidikan selalu menjadi fokus perhatian dan bahkan tak jarang menjadi sasaran ketidakpuasan karena pendidikan menyangkut kepentingan semua orang, bukan hanya menyangkut investasi dan kondisi kehidupan di masa yang datang, melainkan juga menyangkut kondisi dan suasana kehidupan saat ini. Itulah sebabnya pendidikan selalu memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat.

Sekolah sebagai institusi (lembaga) pendidikan, merupakan wadah tempat proses pendidikan dilakukan, memiliki sistem yang kompleks dan dinamis. Dalam kegiatannya, sekolah adalah tempat yang bukan hanya sekedar tempat berkumpul guru dan murid, melainkan berada dalam satu tatanan sistem yang rumit dan saling berkaitan, oleh karena itu sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang membutuhkan pengelolaan. Lebih dari itu, kegiatan inti organisasi sekolah adalah mengelola sumber daya manusia (SDM) yang diharapkan menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, serta pada gilirannya lulusan sekolah diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan bangsa (Fattah, 2004:2).

Sekolah dipandang sebagai suatu organisasi yang didesain untuk dapat berkontribusi terhadap upaya peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat suatu bangsa. Sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia serta peningkatan derajat sosial masyarakat bangsa, sekolah sebagai institusi pendidikan perlu dikelola, diatur, ditata dan diberdayakan, agar sekolah dapat menghasilkan produk atau hasil secara optimal. Dengan kata lain, sekolah sebagai lembaga tempat penyelenggaraan pendidikan, merupakan sistem yang memiliki berbagai perangkat dan unsur yang saling berkaitan yang memerlukan pemberdayaan. Secara internal sekolah memiliki perangkat guru, murid, kurikulum, sarana dan prasarana. Secara eksternal, sekolah memiliki dan berhubungan dengan instansi lain baik secara vertikal maupun horisontal. Di dalam konteks pendidikan, sekolah memiliki *stake holders* (yang berkepentingan), antara lain murid, guru, masyarakat, pemerintah, dunia usaha, oleh karena itulah

sekolah memerlukan pengelolaan (manajemen) yang akurat agar dapat memberikan hasil optimal sesuai kebutuhan dan tuntutan semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*) (Fattah, 2004:2).

Manajemen mengandung arti optimalisasi sumber-sumber daya atau pengelolaan dan pengendalian. Optimalisasi sumber-sumber daya berkenaan dengan pemberdayaan sekolah merupakan alternatif yang paling tepat untuk mewujudkan suatu sekolah yang mandiri dan memiliki keunggulan tinggi. Pemberdayaan dimaksudkan untuk memberikan otonomi yang lebih luas dalam memecahkan masalah di sekolah. Hal itu diperlukan suatu perubahan kebijakan di bidang manajemen pendidikan dengan prinsip memberikan kewenangan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masing-masing sekolah secara lokal (Fattah, 2004:3).

Dapat dipastikan bahwa perubahan kebijakan dalam pelaksanaannya bukan persoalan yang sederhana. Perubahan kebijakan memerlukan kesiapan berbagai sumber daya dan kemampuan pengelola di tingkat sekolah. Namun yang lebih penting adalah pemahaman dan kesiapan pengetahuan yang memadai tentang apa dan bagaimana sistem baru dalam bentuk desentralisasi harus dilakukan oleh sekolah (Fattah, 2004:3).

Beberapa alasan yang menuntut terjadinya perubahan kebijakan dalam pengelolaan sekolah, antara lain: tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap hasil pendidikan yang disebabkan adanya perubahan perkembangan kebijakan sosial politik, ekonomi, dan budaya.

a. Definisi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Secara leksikal manajemen berbasis sekolah diartikan sebagai pengkoordinasian dan penyerasian sumberdaya yang dilakukan secara otonomis (mandiri) oleh sekolah melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan sekolah dalam kerangka pendidikan nasional, dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan (partisipatif). Kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah meliputi: kepala sekolah dan wakil-wakilnya, guru, siswa, konselor, tenaga administratif, orangtua siswa, tokoh masyarakat, para profesional, wakil pemerintahan, wakil organisasi pendidikan. (Slamet PH, 2004: www.depdiknas.org). Secara singkat, MBS diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang beraskan sekolah pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran (Nurkolis, 2003: 8).

MBS dapat dipandang sebagai terjemahan langsung dari *School Based Management* (SBM). Fattah (2004:4) menerjemahkannya sebagai suatu pendekatan praktis yang bertujuan mendesain pengelolaan sekolah dengan memberikan kekuasaan kepada kepala sekolah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya perbaikan kinerja sekolah mencakup guru, kepala sekolah, orangtua siswa, dan masyarakat. Lebih tegas lagi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) sebagai terjemahan dari *School Based Management*, dilihat sebagai suatu pendekatan politik yang bertujuan untuk meningkatkan me-*redisain* pengelolaan sekolah bertujuan untuk memberikan kekuasaan dan meningkatkan partisipasi sekolah dalam upaya perbaikan kinerjanya yang mencakup guru, siswa,

orang tua siswa dan masyarakat. Manajemen Berbasis Sekolah memodifikasi struktur pemerintahan dengan memindahkan otoritas dalam pengambilan keputusan pemerintahan dan manajemen ke setiap yang berkepentingan di tingkat lokal (*local stake holders*). (Fattah, 2004: 4).

MBS juga sering disebut dengan istilah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). MPMBS diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar pada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional (Nurkolis, 2003:9). Hal yang menjadi titik utama dalam MBS, berdasarkan uraian di atas, MBS adalah upaya untuk meningkatkan mutu sekolah. Peningkatan suprastruktur dan infrastruktur hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut.

Berkaitan dengan usaha untuk meningkatkan otonomi sekolah melalui MBS, beberapa kewenangan diberikan langsung ditingkat satuan pendidikan. Beberapa aspek manajemen yang secara langsung dapat diserahkan sebagai urusan yang menjadi kewenangan tingkat sekolah adalah sebagai berikut.

- 1) Penetapan visi, misi, strategi, tujuan, logo, lagu, dan tata tertib sekolah. Ini merupakan bukti kemandirian awal yang harus ditunjukkan oleh sekolah. Dalam menyusun program kerjanya, sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi, misi, strategi, dan tujuan sekolah tersebut, orangtua dan masyarakat yang tergabung dalam Komite Sekolah, serta seluruh warga sekolah harus dilibatkan secara aktif dalam menyusun program kerja sekolah, dan sekaligus

lengkap dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

- 2) Penerimaan siswa baru sesuai dengan ruang kelas yang tersedia, fasilitas yang ada, jumlah guru, dan tenaga administratif yang dimiliki. Berdasarkan sumber daya pendukung yang dimilikinya, sekolah secara bertanggung jawab harus dapat menentukan sendiri jumlah siswa yang akan diterima, syarat siswa yang akan diterima, dan persyaratan lain yang terkait.
- 3) Penetapan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang akan diadakan dan dilaksanakan oleh sekolah. Dalam hal ini, dengan mempertimbangkan kepentingan daerah dan masa depan lulusannya, sekolah perlu diberikan kewenangan untuk melaksanakan kurikulum nasional dengan kemungkinan menambah atau mengurangi muatan kurikulum dengan meminta pertimbangan kepada Komite Sekolah. Kurikulum muatan lokal, misalnya dalam mengambil kebijakan untuk menambah mata pelajaran seperti Bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, komputer, dan sebagainya.
- 4) Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk buku pelajaran dapat diberikan kepada sekolah, dengan memperhatikan standar dan ketentuan yang ada. Misalnya, buku murid tidak seenaknya diganti setiap tahun oleh sekolah, atau buku murid yang akan dibeli oleh sekolah adalah yang telah lulus penilaian, dan sebagainya. Pemilihan dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dapat dilaksanakan oleh sekolah, dengan tetap mengacu kepada standar dan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau provinsi dan kabupaten/kota.

- 5) Penghapusan barang dan jasa dapat dilaksanakan sendiri oleh sekolah, dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah, provinsi, dan kabupaten.
- 6) Proses pengajaran dan pembelajaran. Ini merupakan kewenangan profesional sejati yang dimiliki oleh lembaga pendidikan sekolah. Kepala sekolah dan guru secara bersama-sama merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik dapat belajar dengan lancar dan berhasil. Proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan direkomendasikan sebagai model pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh sekolah.
- 7) Urusan teknis edukatif yang lain sejalan dengan konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) merupakan urusan yang sejak awal harus menjadi tanggung jawab dan kewenangan setiap satuan pendidikan.

b. Tujuan MBS

Tujuan utama MBS adalah peningkatan mutu pendidikan. Dengan adanya MBS sekolah dan masyarakat tidak perlu lagi menunggu perintah dari atas. Mereka dapat mengembangkan suatu visi pendidikan yang sesuai dengan keadaan setempat dan melaksanakan visi tersebut secara mandiri (www.MBEProject.net). Dengan bahasa yang berbeda Slamet (2004: www.depdiknas.go.id) menyebutkan Manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk "memberdayakan" sekolah, terutama sumber daya manusianya (kepala sekolah, guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, dan masyarakat sekitarnya), melalui pemberian kewenangan,

fleksibilitas, dan sumber daya lain untuk memecahkan persoalan yang dihadapi oleh sekolah yang bersangkutan.

Lebih rinci MBS bertujuan untuk:

- 1) meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia;
- 2) meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama;
- 3) meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya; dan
- 4) meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai (Depdiknas, 2005a)

c. Prinsip Implementasi MBS

Dalam mengimplementasikan MBS terdapat 4 (empat) prinsip yang harus dipahami yaitu: kekuasaan; pengetahuan; sistem informasi; dan sistem penghargaan (Depdiknas, 2005b).

1) Kekuasaan

Kepala sekolah memiliki kekuasaan yang lebih besar untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sekolah dibandingkan dengan sistem pendidikan sebelumnya. Kekuasaan ini dimaksudkan untuk memungkinkan sekolah berjalan dengan efektif dan efisien. Kekuasaan yang dimiliki kepala sekolah akan efektif apabila mendapat dukungan partisipasi dari berbagai pihak, terutama guru dan orangtua siswa. Seberapa besar

kekuasaan sekolah tergantung seberapa jauh MBS dapat diimplementasikan. Pemberian kekuasaan secara utuh sebagaimana dalam teori MBS tidak mungkin dilaksanakan dalam seketika, melainkan ada proses transisi dari manajemen yang dikontrol pusat ke MBS.

Kekuasaan yang lebih besar yang dimiliki oleh kepala sekolah dalam pengambilan keputusan perlu dilaksanakan dengan demokratis antara lain dengan:

- a) melibatkan semua pihak, khususnya guru dan orangtua siswa.
- b) membentuk tim-tim kecil di level sekolah yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan yang relevan dengan tugasnya
- c) menjalin kerjasama dengan organisasi di luar sekolah.

2) Pengetahuan

Kepala sekolah dan seluruh warga sekolah harus menjadi seseorang yang berusaha secara terus menerus menambah pengetahuan dan ketrampilan dalam rangka meningkatkan mutu sekolah. Untuk itu, sekolah harus memiliki sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM) lewat berbagai pelatihan atau workshop guna membekali guru dengan berbagai kemampuan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar. Pengetahuan yang penting harus dimiliki oleh seluruh staf adalah sebagai berikut.

- a) pengetahuan untuk meningkatkan kinerja sekolah,

- b) memahami dan dapat melaksanakan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan *quality assurance*, *quality control*, *self assessment*, *school review*, *benchmarking*, *SWOT*, dll).

3) Sistem Informasi

Sekolah yang melakukan MBS perlu memiliki informasi yang jelas berkaitan dengan program sekolah. Informasi ini diperlukan agar semua warga sekolah serta masyarakat sekitar bisa dengan mudah memperoleh gambaran kondisi sekolah. Dengan informasi tersebut warga sekolah dapat mengambil peran dan partisipasi. Disamping itu ketersediaan informasi sekolah akan memudahkan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas sekolah. Informasi yang amat penting untuk dimiliki sekolah antara lain yang berkaitan dengan: kemampuan guru dan Prestasi siswa

4) Sistem Penghargaan

Sekolah yang melaksanakan MBS perlu menyusun sistem penghargaan untuk memberikan penghargaan kepada warga sekolah yang berprestasi. Sistem penghargaan ini diperlukan untuk mendorong karier warga sekolah, yaitu guru, karyawan dan siswa. Dengan sistem ini diharapkan akan muncul motivasi dan ethos kerja dari kalangan sekolah. Sistem penghargaan yang dikembangkan harus bersifat adil dan merata.

Selain prinsip penerapan di atas, perlu diketahui bahwa teori yang digunakan MBS untuk mengelola sekolah didasarkan pada empat prinsip, yaitu

prinsip ekuifinalitas, prinsip desentralisasi, prinsip sistem pengolahan mandiri, dan prinsip inisiatif sumber daya manusia (Nurkolis, 2003:52-66).

1) Prinsip Ekuifinalitas (*Principle of Equifinality*)

Prinsip ini didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda –beda untuk mencapai suatu tujuan. MBS menekankan fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola oleh warga sekolah menurut kondisi mereka masing-masing. Karena pekerjaan sekolah yang sangat kompleks dan antar sekolah memiliki banyak perbedaan misalnya tingkat akademik dan situasi komonitasnya, maka sekolah tidak dapat dijalankan dengan struktur yang standar diseluruh kota.

Pendidikan sebagai entitas yang terbuka terhadap berbagai pengaruh eksternal. Oleh karena itu , tidak menutup kemungkinan bila sekolah akan mendapatkan berbagai masalah. Masalah kenakalan remaja, pemakaian narkotika dan obat-obatan terlarang, masalah kriminal dan kejahatan intelektual akan menjadi tantangan sekolah saat ini dan masa mendatang. Sekolah harus mampu menghadapinya dengan cara yang paling tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisinya.

2) Prinsip Desentralisasi (*Principle of Decentralization*)

Desentralisasi adalah gejala yang penting dalam reformasi manajemen sekolah modern. Prinsip ini konsisten dengan prinsip ekuifinalitas. Pendidikan adalah masalah yang rumit dan kompleks sehingga

memerlukan desentralisasi dalam pelaksanaannya. Prinsip ekuifinalitas mendorong adanya desentralisasi kekuasaan dengan memberikan ruang yang lebih luas pada sekolah untuk menjalankan dan mengelola sekolahnya secara efektif.

Tujuan prinsip desentralisasi adalah efisiensi dalam pemecahan masalah, bukan menghindari masalah. Oleh karena itu, MBS harus mampu menemukan masalah, memecahkannya tepat waktu dan memberi sumbangan yang lebih besar terhadap efektivitas aktivitas pengajaran dan pembelajaran.

3) Prinsip Sistem Pengelolaan Mandiri (*Principle of Self-Managing Sistem*)

Sekolah perlu mencapai tujuan-tujuan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan berbagai cara yang berbeda-beda. MBS menyadari pentingnya untuk mempersilakan sekolah menjadi sistem pengelolaan secara mandiri di bawah kebijakannya sendiri. Dengan demikian sekolah akan lebih memiliki inisiatif dan tanggung jawab.

Prinsip ini terkait dengan prinsip ekuifinalitas dan desentralisasi. Ketika sekolah menghadapi permasalahan maka harus diselesaikan dengan caranya sendiri. Permasalahan ini bisa diselesaikan bila telah terjadi pelimpahan wewenang dari birokrasi di atasnya ke tingkat sekolah. Dengan kewenangan tersebut sekolah dapat melakukan sistem pengelolaan mandiri.

4) Prinsip Inisiatif Manusia (*Principle of Human Initiative*)

Faktor manusia memiliki pengaruh penting pada efektivitas organisasi. Perspektif sumber daya manusia menekankan bahwa orang adalah sumber daya berharga di dalam organisasi

d. Komponen MBS

Tujuan Program MBS adalah peningkatan mutu pembelajaran. Program ini terdiri atas tiga komponen, yaitu:

- a) Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)
- b) Peran Serta Masyarakat (PSM), dan
- c) Peningkatan Mutu Kegiatan Belajar Mengajar melalui Peningkatan Mutu Pembelajaran yang disebut Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan (PAKEM) di SD-MI, dan Pembelajaran Kontekstual di SLTP-MTs (www.MBEProject.net).

e. Dampak MBS

Dampak yang diberikan MBS bagi Sekolah adalah

- b) MBS menciptakan rasa tanggung jawab melalui administrasi sekolah yang lebih terbuka. Kepala sekolah, guru, dan anggota masyarakat bekerja sama dengan baik untuk membuat Rencana Pengembangan Sekolah. Sekolah memajukan anggaran sekolah dan perhitungan dana secara terbuka pada papan sekolah.
- c) Keterbukaan ini telah meningkatkan kepercayaan, motivasi, serta dukungan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah. Banyak sekolah yang melaporkan kenaikan sumbangan orang tua untuk menunjang sekolah.
- d) Pelaksanaan PAKEM (Pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan) atau Pembelajaran Kontekstual dalam MBS,

mengakibatkan peningkatan kehadiran anak di sekolah, karena mereka senang belajar (www.MBEProject.net).

f. Hal – hal yang Perlu Dilakukan Berkaitan dengan MBS

Implementasi MBS secara benar akan memberikan dampak positif terhadap perubahan tingkah laku warga sekolah yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Berdasarkan 9 kewenangan yang diserahkan kepada sekolah, maka hal yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dan warganya adalah seperti diuraikan berikut ini (Depdiknas, 2005c).

a) Perencanaan dan Evaluasi

- (1) Salah satu tugas pokok yang harus dilakukan oleh kepala sekolah sebelum merencanakan program peningkatan mutu sekolah adalah mendata sumber daya yang dimiliki sekolah (sarana dan prasarana, siswa, guru, staf administrasi, dan lingkungan sekitar, dll)
- (2) Menganalisis tingkat kesiapan semua sumber daya sekolah tersebut
- (3) Berdasarkan data dan analisis kesiapan sumber daya, kepala sekolah dengan warga sekolah secara bersama-sama menyusun program peningkatan mutu sekolah untuk jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek
- (4) Menyusun skala prioritas program peningkatan mutu untuk program jangka pendek yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan
- (5) Menyusun RAPBS untuk program satu tahun ke depan

- (6) Menyusun sistem evaluasi pelaksanaan program sekolah bersama dengan warga sekolah
 - (7) Melakukan evaluasi diri terhadap pelaksanaan program sekolah secara jujur dan transparan kemudian ditindaklanjuti dengan perbaikan terus-menerus
 - (8) Melakukan refleksi diri terhadap semua program yang telah dilaksanakan
 - (9) Melatih guru dan tokoh masyarakat dalam implementasi MBS
 - (10) Menyelenggarakan lokakarya untuk evaluasi
- b) Pengelolaan Kurikulum
- (1) Standar kurikulum 2004 yang akan diberlakukan telah ditentukan oleh pusat, sekolah sebelum menjabarkan kurikulum tersebut harus terlebih dahulu Pemahaman kurikulum (silabus, materi pokok)
 - (2) Mengembangkan silabus berdasarkan kurikulum
 - (3) Mencari bahan ajar yang sesuai dengan materi pokok
 - (4) Menyusun kelompok guru sebagai penerima program pemberdayaan
 - (5) Mengembangkan kurikulum (memperdalam, memperkaya, dan memodifikasi), namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional.
 - (6) Selain itu, sekolah diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum muatan lokal.
- c) Pengelolaan Proses Belajar Mengajar

Proses belajar mengajar merupakan aktifitas yang sangat penting dalam proses pendidikan di sekolah. Disinilah guru dan siswa berinteraksi dalam rangka transfer ilmu dan pengetahuan kepada siswa. Keberhasilan sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan sangat bergantung pada apa yang dilakukan oleh guru di kelas. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat:

- (1) Menciptakan pembelajaran yang berpusat pada siswa
 - (2) Mengembangkan model pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*)
 - (3) Jumlah siswa per kelas tidak lebih dari 40 siswa
 - (4) Memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar
 - (5) Memanfaatkan lingkungan dan sumber daya lain di luar sekolah sebagai sumber belajar
 - (6) Pemanfaatan laboratorium untuk pemahaman materi
 - (7) Mengembangkan evaluasi belajar untuk 3 ranah (*cognitif, afektif, psikomotorik*)
 - (8) Mengembangkan bentuk evaluasi sesuai dengan materi pokok
 - (9) Mengintegrasikan *life skill* dalam proses pembelajaran
 - (10) Menumbuhkan kegemaran membaca
- d) Pengelolaan Ketenagaan
- (1) Menganalisis kebutuhan tenaga pendidikan dan non kependidikan
 - (2) Pembagian tugas guru dan staf yang jelas sesuai dengan kemampuan dan keahliannya
 - (3) Melakukan pengembangan staf melalui MGMP, seminar, dll

- (4) Pemberian penghargaan (*reward*) kepada yang berprestasi dan sanksi (*punishment*) kepada yang melanggar
 - (5) Semua tenaga yang dibutuhkan tersedia di sekolah sesuai dengan analisis kebutuhan
- e) Pengelolaan Fasilitas (Peralatan dan Perlengkapan)
- (1) Mengetahui keadaan dan kondisi sarana dan fasilitas
 - (2) Mengadakan alat dan sarana belajar
 - (3) Menggunakan sarana dan fasilitas sekolah
 - (4) Memelihara dan merawat kebersihan
- f) Pengelolaan Keuangan
- (1) Semua dana yang dibutuhkan dan akan digunakan dimasukkan dalam RAPBS
 - (2) Mengelola keuangan dengan transparan dan akuntabel
 - (3) Pembukuan keuangan rapih
 - (4) Ada laporan pertanggungjawaban keuangan setiap bulan
- g) Pelayanan Siswa
- (1) mengidentifikasi dan membangun kelompok siswa di sekolah
 - (2) Melakukan proses penerimaan siswa baru dengan transparan
 - (3) Pengembangan potensi siswa (emosional, spiritual, bakat)
 - (4) Melakukan kegiatan ekstra kurikuler
 - (5) Mengembangkan bakat siswa (Olahraga dan seni)
 - (6) Mengembangkan kreatifitas
 - (7) Membuat majalah dinding

- (8) Mengikuti lomba-lomba bidang keilmuan dan non keilmuan
 - (9) Mengusahakan beasiswa melalui subsidi silang
 - (10) Fasilitas kegiatan siswa tersedia dalam kondisi baik
- h) Hubungan Sekolah-Masyarakat
- (1) Membentuk Komite Sekolah
 - (2) Menjaga hubungan baik dengan Komite Sekolah
 - (3) Melibatkan masyarakat dalam menyusun program sekolah, melaksanakan, dan mengevaluasi
 - (4) mengembangkan hubungan yang harmonis antara sekolah dengan masyarakat
- i) Pengelolaan Iklim Sekolah
- (1) Menegakkan disiplin (siswa, guru, staf)
 - (2) Menciptakan kerukunan beragama
 - (3) Menciptakan kekeluargaan di sekolah
 - (4) Budaya bebas narkoba

Dengan mengalihkan wewenang dalam keputusan dari pemerintahan tingkat Pusat/ Kanwil/ Kandep ke tingkat sekolah, diharapkan sekolah akan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakatnya. Pada pelaksanaannya disadari bahwa mengimplementasikan pemberian kewenangan kepada sekolah melalui pendekatan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) memerlukan proses dan waktu.

C. Kerangka Berpikir

1. Hubungan antara Tingkat Pendidikan anggota Komite Sekolah dengan Kinerja Komite Sekolah

Dalam rangka penerapan MBS, sebagai rangkaian peningkatan otonomi di sekolah, pembentukan Komite Sekolah menjadi hal yang sangat penting. Komite ini diharapkan menjadi garda depan pelaksanaan MBS. Kinerja Komite Sekolah menjadi taruhan keberhasilan MBS di sekolah karena posisinya yang strategis. Kinerja yang berkualitas akan menjadikan penerapan MBS lebih berkualitas, demikian juga sebaliknya.

Sayangnya, hal ini belum disadari karena lebih banyak sekolah yang menjadikan pelaksanaan MBS dan pembentukan Komite Sekolah sebagai keharusan saja. Komite Sekolah masih dianggap sebagai reka ulang POMG atau BP3. Artinya faktor – faktor untuk tercapainya keoptimalan kinerja dan proses pelaksanaan tidak terlalu diperhatikan. Anggota hanya diangkat dari orang tua murid.

Hal di atas terjadi karena masyarakat sudah terlalu lama terbiasa dengan manajemen terpusat. Usaha proaktif menjadi barang yang langka. Imbas yang paling terasa adalah orang tua dan anggota masyarakat yang lain belum sepenuhnya tersadar akan tanggung jawab mereka untuk memajukan sekolah.

Upaya untuk melepaskan diri dari ketidakmandirian ini juga harus mulai diterapkan dalam Komite Sekolah. Komite Sekolah harus berisikan orang – orang yang memiliki semangat maju. Semangat ini dapat tercermin dari tingkat pendidikan anggota Komite Sekolah yang terpilih. Diasumsikan bahwa tingkat

pendidikan yang rendah menggambarkan usaha untuk memajukan sekolah dalam diri seseorang masih rendah dan sebaliknya tingkat pendidikan yang tinggi menggambarkan semangat yang tinggi untuk memajukan sekolah. Terbukti dari penelitian The British Council (2001), orang yang berpendidikan lebih tinggi ternyata lebih aktif dari pada orang yang berpendidikan lebih rendah.

2. Hubungan antara Pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dengan Kinerja Komite Sekolah

Dunia pendidikan ditempatkan sebagai salah satu komponen dalam peningkatan kualitas hidup manusia. Namun, pendidikan bukanlah suatu upaya yang sederhana, melainkan suatu kegiatan yang dinamis, berubah seiring dengan perubahan jaman. Oleh karena itu, pendidikan selalu memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat. Demikian juga sekolah, sebagai institusi tempat proses pendidikan berlangsung, memerlukan pengelolaan yang tepat agar dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, sekolah mendapatkan kesempatan otonomi yang lebih luas dalam memecahkan masalah di sekolah dan untuk mengembangkan diri menjadi sebuah lembaga yang mandiri dan memiliki keunggulan tinggi. Dengan adanya hal ini, maka diperlukan suatu perubahan kebijakan di bidang manajemen pendidikan dengan prinsip memberikan kewenangan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masing-masing sekolah secara lokal.

Penerapan MBS harus dimulai dari pemahaman apa dan bagaimana MBS. Komite Sekolah sebagai salah satu komponen penting dalam pelaksanaan manajemen baru ini harus memiliki kesiapan terutama dalam hal pemahaman dan pengetahuan yang memadai tentang apa dan bagaimana sistem baru dalam bentuk desentralisasi harus dilakukan oleh sekolah. Pengetahuan mengenai MBS menjadi penggerak roda kerja Komite Sekolah dan bagaimana bentuk MBS yang diinginkan.

Kurangnya pengetahuan akan menyebabkan anggota Komite Sekolah kurang bisa menyadari arti dan kedudukan Komite Sekolah dalam pelaksanaan MBS di sekolah, terlebih lagi kaitannya dengan menumbuhkan semangat otonomi di sekolah. Padahal kondisi ini sangat berbeda dengan situasi dan kedudukan POMG maupun BP3 di sekolah. Akibatnya MBS tidak terarah, tidak terkendali dan hanya sekedar nama tanpa pelaksanaan.

Pengetahuan anggota Komite Sekolah akan menjadi faktor penting dalam pelaksanaan MBS. Pengetahuan yang baik akan menggerakkan dan mengarahkan kerja komite menjadi lebih baik dan berhasil guna. Kinerja Komite Sekolah akan lebih baik karena mereka mengetahui apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya sesuai dengan prinsip MBS

3. Hubungan Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dengan Kinerja Komite Sekolah

Perlu diakui bahwa MBS memang belum tersosialisasi dengan baik. Namun, demi kepentingan kemajuan sekolah, pelaksanaan MBS merupakan suatu keharusan. Komite Sekolah sebagai salah satu komponen utama pelaksanaannya

tidak seharusnya menjadi penyebab macetnya roda MBS dengan alasan belum tersosialisasinya MBS kepada mereka. Anggota Komite Sekolah dituntut untuk proaktif menemukan sendiri apa dan bagaimana sebenarnya konsep MBS itu dengan belajar dan menggali informasi sendiri untuk menambah pengetahuan mengenai MBS.

Pengetahuan mengenai MBS menjadi penggerak roda kerja Komite Sekolah dan bagaimana bentuk MBS yang diinginkan. Dengan pengetahuan ini anggota Komite Sekolah tidak terjebak pada lingkaran yang menempatkan MBS sebagai sebuah proyek tanpa makna. Artinya, Komite Sekolah dan MBS hanya dijadikan sebagai pelengkap organisasi sekolah tetapi pelaksanaannya sama dengan lembaga BP₃. Sebagaimana telah disebutkan di atas, pengetahuan yang baik akan meningkatkan kinerja komite menjadi lebih baik dan berhasil guna.

Belum tersosialisasinya MBS dan Komite Sekolah, diharapkan akan dapat teratasi dengan tingginya kemauan belajar dari anggota Komite Sekolah. Dan hal ini berkait langsung dengan tingkat pendidikan seseorang. Kemauan untuk belajar nampak dari tingkat pendidikan seseorang. Tingkat pendidikan seseorang searah dengan kemauan mereka untuk belajar. Makin tinggi tingkat pendidikan seseorang dapat diasumsikan makin tinggi pula kemauan mereka untuk belajar. Tingkat pendidikan yang tinggi juga akan memperbaiki kinerja Komite Sekolah karena orang yang berpendidikan lebih tinggi lebih aktif dari pada orang yang berpendidikan lebih rendah.

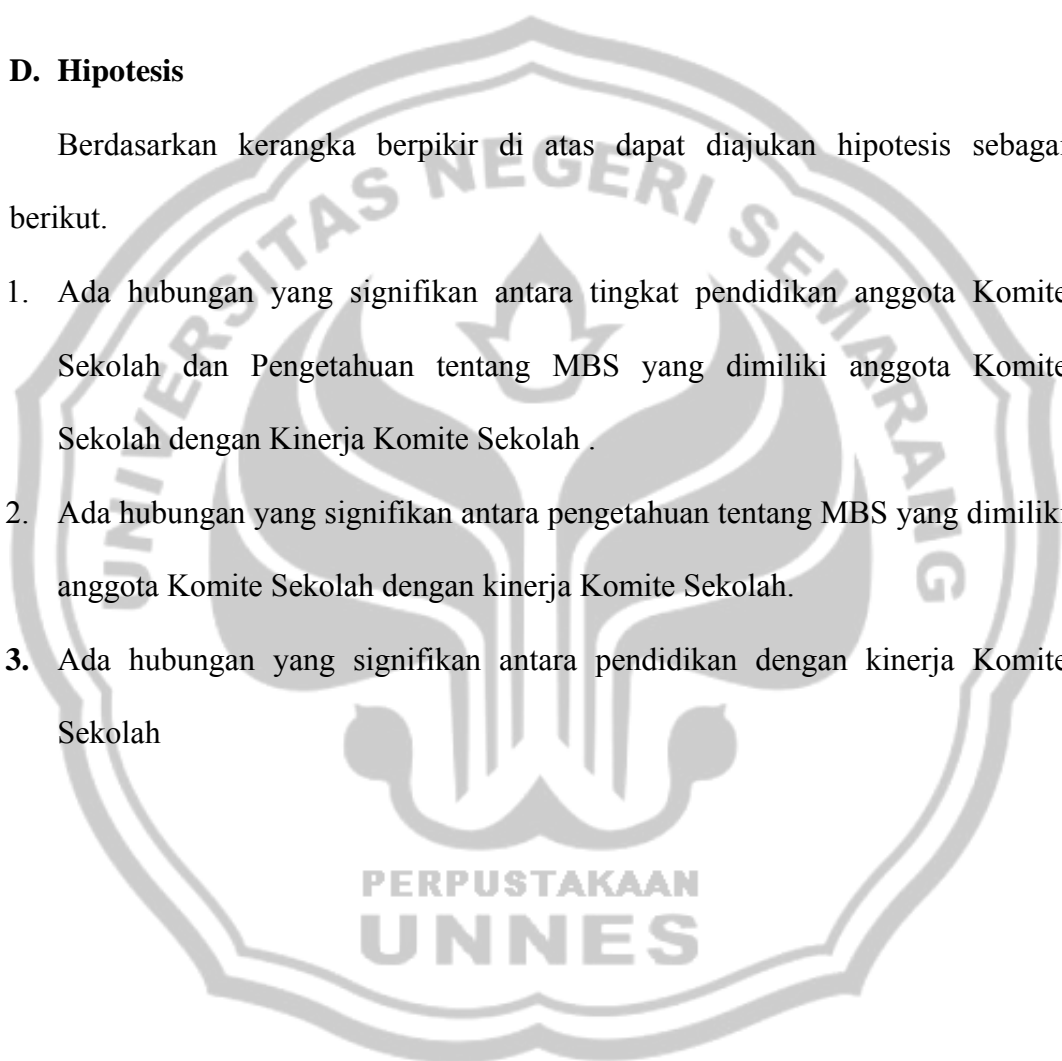
Tingkat pendidikan akan mempengaruhi kemauan untuk belajar hal – hal yang baru dan dengan belajar ini akan diperoleh pengetahuan yang lebih baik.

Pada akhirnya kinerja Komite Sekolah akan lebih baik pula karena didukung oleh pendidikan dan pengetahuan anggota Komite Sekolah akan semakin memahami arah tindakan operasional yang diambil sehingga kinerja mereka akan semakin baik.

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berpikir di atas dapat diajukan hipotesis sebagai berikut.

1. Ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan anggota Komite Sekolah dan Pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dengan Kinerja Komite Sekolah .
2. Ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dengan kinerja Komite Sekolah.
3. Ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan kinerja Komite Sekolah



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota dan Kabupaten Magelang mulai 4 Desember 2006 sampai dengan 15 Januari 2007

B. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *ex post facto* dengan tiga variabel yang terdiri dari dua prediktor dan satu variabel terikat. Prediktornya adalah tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dan variabel terikat adalah Kinerja Anggota Komite Sekolah.

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Untuk menghindari salah pengertian, maka dalam penelitian ini diberikan definisi operasional variabel sebagai berikut:

1. Variabel Bebas
 - a. **Tingkat pendidikan anggota Komite Sekolah** adalah tingkat pendidikan formal tertinggi yang pernah ditempuh oleh anggota Komite Sekolah, dan dinyatakan dalam skor yang sesuai dengan tinggi rendahnya tingkat pendidikan Komite Sekolah. Data ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner kepada Anggota Komite yang terpilih sebagai sampel.
 - b. **Pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah** adalah segala pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah yang

dimiliki oleh setiap anggota Komite Sekolah yang ditunjukkan dengan nilai yang diperoleh anggota Komite Sekolah dari hasil tes pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah

2. Variabel Terikat

Kinerja Komite Sekolah adalah. kualitas hasil kerja sebagaimana dinilai oleh anggota Komite Sekolah terhadap Komite Sekolah sendiri melalui angket evaluasi diri

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota Komite Sekolah SMA Negeri di Kota dan Kabupaten Magelang. Terdapat lima SMA Negeri di Kota dan 10 SMA Negeri di Kabupaten Magelang. Selanjutnya sampel diambil dari 10 sekolah di kota dan kabupaten Magelang. SMA Negeri di Kota seluruhnya dijadikan sebagai sampel sedangkan dari Kabupaten Magelang diambil 5 secara acak. Jumlah total anggota Komite Sekolah yang dijadikan sampel adalah 77 yang berasal dari 10 SMA Negeri.

Jumlah anggota Komite Sekolah yang terambil sebagai sampel dari setiap sekolah ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3 Jumlah Anggota Komite Sekolah dari setiap Sekolah Sampel

No	Sekolah	Jumlah Sampel	No	Sekolah	Jumlah Sampel
1	SMA Negeri 1 Magelang	10	6	SMA Negeri 1 Bandongan	7
4	SMA Negeri 2 Magelang	4	7	SMA Negeri 1 Mertoyudan	8
2	SMA Negeri 3 Magelang	8	8	SMA Negeri 1 Mungkid	5
3	SMA Negeri 4 Magelang	8	9	SMA Negeri 1 Muntilan	8
5	SMA Negeri 5 Magelang	13	10	SMA Negeri Salaman	6

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, jenis penelitian survey.

F. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Data penelitian berupa tingkat pendidikan, nilai pengetahuan subjek tentang MBS dan kinerja Komite Sekolah. Instrumen pengambil data tingkat pendidikan berupa angket yang berisi pertanyaan mengenai pendidikan tertinggi subjek. Sedangkan penjenjangannya berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 (lihat halaman 33). Penskoran untuk tingkat pendidikan anggota komite ini dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Skor Pendidikan Anggota Komite Sekolah

No	Pendidikan tertinggi Anggota Komite Sekolah	Skor
1.	Sekolah Dasar	0
2.	Sekolah Menengah Pertama	1
3.	Sekolah Menengah Atas	2
4.	D1, D2, dan D3	3
5.	Sarjana (S1)	4
6.	Master (S2)	5
7.	Doktor (S3)	6

Instrumen penilaian pengetahuan anggota Komite Sekolah terhadap MBS berupa tes objektif. Tes ini terdiri dari 30 butir soal yang berisi pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah. Nilai yang diperoleh anggota Komite Sekolah ditentukan dengan rumus berikut.

$$N = \frac{\text{Jumlah jawaban benar}}{30} \times 100$$

Instrumen penilaian kinerja Komite Sekolah berupa angket berskala sikap yang harus diisi oleh anggota Komite Sekolah. Instrumen ini diambil dari penilaian mandiri kinerja Komite Sekolah yang telah dimodifikasi peneliti.

Nilai yang diperoleh anggota Komite Sekolah ditentukan dengan rumus berikut.

$$N = \frac{\text{Jumlah skor jawaban}}{108} \times 100$$

Data penelitian secara lengkap dapat dilihat pada **lampiran**. Rangkuman pengumpulan data tersebut dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel.5 Rangkuman data kinerja berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
1.00	4	63.89	96.30	297.90	74.4750	14.84464
2.00	18	52.78	96.30	1419.47	78.8594	11.56493
3.00	6	73.15	87.04	478.71	79.7850	5.34850
4.00	39	48.15	95.37	3031.50	77.7308	12.21354
5.00	10	53.70	94.44	775.92	77.5920	14.06151
Total	77	48.15	96.30	6003.50	77.9675	11.81679

Tabel.6. Rangkuman data kinerja berdasarkan pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah

TahuMBS	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
26.67	2	49.07	62.96	112.03	56.0150	9.82171
30.00	1	53.70	53.70	53.70	53.7000	.
33.33	2	54.63	73.15	127.78	63.8900	13.09562
36.67	2	48.15	60.19	108.34	54.1700	8.51357
40.00	2	50.93	52.78	103.71	51.8550	1.30815
43.33	2	62.04	67.59	129.63	64.8150	3.92444
46.67	3	66.67	77.78	211.12	70.3733	6.41436

50.00	4	63.89	79.63	280.56	70.1400	6.86091
53.33	10	66.67	79.63	720.12	72.0120	4.45104
56.67	3	76.85	85.19	240.74	80.2467	4.37984
60.00	7	73.15	80.56	550.02	78.5743	3.13808
63.33	9	75.93	84.26	712.97	79.2189	2.58194
66.67	6	76.85	94.44	492.59	82.0983	6.58935
70.00	9	84.26	95.37	787.04	87.4489	3.27679
73.33	1	90.74	90.74	90.74	90.7400	.
76.67	7	87.96	94.44	638.89	91.2700	2.66517
80.00	7	86.11	96.30	643.52	91.9314	3.69506
Total	77	48.15	96.30	6003.50	77.9675	11.81679

G. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan regresi ganda (dua prediktor). Keseluruhan proses analisis dilakukan dengan menggunakan program *SPSS 12.0 for Windows*.

1. Uji Persyaratan Analisis

Analisis regresi dapat digunakan apabila memenuhi beberapa persyaratan, yaitu populasi harus mempunyai variansi yang homogen dan data harus memenuhi distribusi normal. Hasil uji normalitas untuk kinerja diperoleh tingkat signifikansi (P) = 0,006, sedangkan untuk pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dan pendidikan P masing-masing 0,006 dan 0,000. P untuk uji homogenitas adalah 0,001. Hasil uji normalitas dan homogenitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Dengan melihat tingkat signifikansi ($P < 0,05$) berarti bahwa sampel berasal dari populasi normal dan homogen.

2. Analisis Data

a. Model Regresi Linier

Model regresi linear menggunakan asumsi bahwa hubungan antara variabel terikat dengan semua prediktor (variabel bebas) adalah linear dalam penelitian ini hubungan tersebut dinyatakan dalam persamaan berikut.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Y = nilai variabel terikat (KINERJA)

β_0 = nilai konstanta

β = nilai koefisien untuk setiap predictor

$\beta_1 X_1$ = prediktor X_1 (PENDIDIKAN) dikalikan dengan koefisiennya

$\beta_2 X_2$ = prediktor X_2 (PENGETAHUAN TENTANG MBS YANG DIMILIKI ANGGOTA KOMITE SEKOLAH) dikalikan dengan koefisiennya

ε = kesalahan observasi

Model ini linear karena dengan menaikkan nilai prediktor akan menaikkan juga nilai variabel terikat. β_0 adalah intersep, nilai prediksi dari variabel terikat jika semua nilai prediktor = 0.

Hasil Uji:

b. Penentuan model garis lurus

Tabel 7. Hasil Analisis Penentuan Model Garis Lurus

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28.057	3.224		8.704	.000
	Pendidikan	.908	.504	.088	1.801	.076
	TahuMBS	.779	.042	.914	18.780	.000

a Dependent Variabel: Kinerja

Berdasarkan hasil ini, model persamaan garis lurus yang dibentuk adalah:

$$Y = 28,057 + 0.908 * Pendidikan + 0.779 * tahuMBS + \varepsilon$$

Tingkat signifikansi untuk pendidikan $P = 0.076$ dengan $\alpha = 0,05$ ($P > \alpha$) menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan tidak signifikan terhadap Kinerja

Tingkat signifikansi untuk pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah (tahuMBS) $P = 0.000$ dengan $\alpha = 0,05$ ($P < \alpha$) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari Pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah terhadap Kinerja.

Untuk mengetahui apakah model memberikan prediksi yang baik untuk setiap variasi variabel bebas dapat melihat table berikut.

Tabel 8. Hasil Analisis Penentuan Prediksi Variabel Terikat oleh Variabel Bebas

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8771.913	2	4385.956	176.348	.000(a)
	Residual	1840.455	74	24.871		
	Total	10612.368	76			

a Prediktors: (Constant), TahuMBS, Pendidikan

b Dependent Variabel: Kinerja

Berdasarkan hasil analisis ini, nilai $F_{hitung} = 176,348$ jauh di atas nilai $F_{tabel} (F_{2,74}) = 3,13$. nilai signifikansi (P) = 0,000 atau $P < \alpha (0,05)$. hal ini berarti bahwa variasi yang ditunjukkan oleh model bukan merupakan kebetulan. Dengan hasil ini maka persamaan $Y = 28,057 + 0.908 * Pendidikan + 0.779 * tahuMBS + \varepsilon$ dapat digunakan untuk meramalkan Y (kinerja) dari nilai Pendidikan dan Pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah.

Tabel 9. Hasil Analisis Penentuan Koefisien Korelasi Ganda Model

Mode	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.909(a)	.827	.822	4.98708

a Prediktors: (Constant), TahuMBS, Pendidikan

R, koefisien korelasi ganda, adalah korelasi linear antara nilai variabel terikat yang diamati dan nilai yang diprediksi. Semakin besar nilainya menunjukkan hubungan yang semakin kuat.

R Square, (R^2) adalah koefisien determinasi yang merupakan kuadrat dari koefisien korelasi ganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa $R^2 = 0,827$ atau lebih dari 80% variansi dapat diprediksi dengan menggunakan persamaan regresi yang diperoleh

Penelitian ini juga memperhitungkan hubungan antara satu variabel bebas dengan variabel terikat dengan variabel bebas lain dikendalikan. perhitungan dilakukan terhadap korelasi antara pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dan kinerja Komite Sekolah jika pendidikan dikendalikan, dan korelasi antara pendidikan dan kinerja Komite Sekolah jika

pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dikendalikan.

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan program SPSS 12.0 for Windows.

Tabel 10. Hasil Analisis Korelasi antara Pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dan Kinerja Komite Sekolah jika Pendidikan Dikendalikan

Control Variabels			Kinerja	TahuMBS
Pendidikan	Kinerja	Correlation	1.000	.909
		Significance (2-tailed)	.	.000
		Df	0	74
	TahuMBS	Correlation	.909	1.000
		Significance (2-tailed)	.000	.
		Df	74	0

Tabel 11. Hasil Analisis Korelasi antara Pendidikan dan Kinerja Komite Sekolah jika Pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dikendalikan

Control Variabels			Pendidikan	Kinerja
TahuMBS	Pendidikan	Correlation	1.000	.205
		Significance (2-tailed)	.	.076
		Df	0	74
	Kinerja	Correlation	.205	1.000
		Significance (2-tailed)	.076	.
		Df	74	0

Dari kedua hasil perhitungan di atas, nampak bahwa:

1. harga koefisien korelasi (r) untuk pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dan kinerja Komite Sekolah jika pendidikan dikendalikan = 0,909 dengan $P = 0,000$ ($P < \alpha$), sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang MBS yang

dimiliki anggota Komite Sekolah dengan kinerja Komite Sekolah jika pendidikan dikendalikan

2. harga koefisien korelasi (r) untuk pendidikan dan kinerja Komite Sekolah jika pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dikendalikan = 0,205 dengan $P = 0,076$ ($P > \alpha$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dan kinerja Komite Sekolah jika pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dikendalikan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Data yang diperoleh pada penelitian ini terangkum dalam table berikut ini.

Tabel 12. Rangkuman Data Penelitian

Parameter	PENDIDIKAN	PENGETAHUAN MBS	KINERJA
Jumlah Responden	77	77	77
Mean	3.43	60.04	77.97
Minimum	1.00	26.67	48.15
Maximum	5.00	80.00	96.30
StdDev	1.14	13.86	11.82

Berdasarkan hasil analisis regresi dua prediktor dan korelasi, diperoleh hasil sebagai berikut.

1. Harga koefisien korelasi ganda (r_{xy}), 0,909, Koefisien determinasi 0,827 atau lebih dari 80% data dapat diprediksi dari persamaan linear $Y = 28,057 + 0.908 * Pendidikan + 0.779 * tahuMBS + \varepsilon$
2. Harga koefisien korelasi (r) untuk pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dan kinerja Komite Sekolah jika pendidikan dikendalikan = 0,909 dengan $P = 0,000 (P < \alpha)$,
3. Harga koefisien korelasi (r) untuk pendidikan dan kinerja Komite Sekolah jika pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dikendalikan = 0,205 dengan $P = 0,076 (P > \alpha)$.

B. Pembahasan

1. Hubungan tingkat Pendidikan dan Pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dengan Kinerja Komite Sekolah

Berdasarkan data dan analisisnya diketahui bahwa rerata kinerja yang dicapai oleh semua sekolah sampel adalah 77,97 dengan kisaran data dari 48,15 hingga 98,30 (tabel. 4). Rerata kinerja yang dicapai ini belum dapat dikategorikan tinggi. Namun demikian, sebagaimana telah dianalisis, ada hubungan tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dengan Komite Sekolah. Hubungan ini mengindikasikan pengaruh yang positif dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh anggota komite dan pengetahuan mereka tentang MBS terhadap kinerja mereka.

Hasil ini memberikan arahan bahwa untuk mendapatkan Komite Sekolah dengan kinerja yang memuaskan diperlukan anggota dengan pendidikan yang baik dan pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah yang tinggi pula. Artinya dalam pemilihan anggota Komite Sekolah, tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dapat dijadikan sebagai kriteria.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa agar MBS terlaksana secara optimal, peran masyarakat baik Komite Sekolah maupun *stakeholder* lainnya harus maksimal pula, karena kunci dari MBS adalah pemberdayaan masyarakat sekitar sehingga sekolah menjadi milik bersama dan mandiri. Komite Sekolah merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam perbaikan pelayanan pendidikan.

Dengan demikian hendaknya pembentukan Komite Sekolah bukan sekedar mengganti label dari BP3. Pembentukan Komite Sekolah harus benar-benar didasari pada perubahan kerangka pemikiran (*mindset*) dari warga sekolah. Perannya tidak sekedar pelengkap pelaksanaan MBS akan tetapi menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan MBS yang bertujuan untuk mejadikan sekolah menjadi lembaga yang demokratis dan mandiri.

Mengingat peran yang besar ini, anggota Komite Sekolah harus benar-benar manusia unggul yang akan menyajikan kinerja yang berkualitas. Oleh karena itu potensi tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah yang dimiliki harus menjadi perhatian dalam pembentukan Komite Sekolah. Tujuan utama dari pembentukan Komite Sekolah memang tidak berhenti pada pencapaian kinerja yang tinggi akan tetapi lebih jauh dari itu, kinerja tinggi ini dapat diimplementasikan untuk pelaksanaan MBS yang lebih baik.

2. Hubungan Pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dengan Kinerja Komite Sekolah

Berdasarkan analisis data, harga koefisien korelasi (r) parsial menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dan kinerja Komite Sekolahjika pendidikan dikendalikan. Pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dapat dikatakan memberikan pengaruh yang cukup besar pada kinerja Komite Sekolah. Pengaruh ini positif, artinya semakin tinggi pengetahuan tentang MBS

yang dimiliki anggota Komite Sekolah yang dimiliki oleh anggota Komite Sekolah, semakin tinggi pula kinerja mereka.

Hasil ini mendukung analisis sebelumnya. Namun, bila dilihat dari data yang ada, rerata kinerja yang dicapai adalah 77,97 dengan kisaran data dari 48,15 hingga 98,30, dan rerata pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah adalah 60,04 dengan kisaran data 26,67 hingga 80,00 (table. 4). Data-data ini mengindikasikan bahwa pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dan kinerja yang ditampilkan anggota Komite Sekolah belum maksimal.

Korelasi yang positif antara pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dan kinerja Komite Sekolah memberikan arah bahwa untuk meningkatkan kinerja Komite Sekolah diperlukan peningkatan pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah. Faktor kunci dari masalah ini adalah sosialisasi dan proses pembentukan Komite Sekolah itu sendiri. Kritik tentang kurangnya sosialisasi MBS dan Komite Sekolah harus mendapat perhatian yang serius untuk dapat meningkatkan kinerja Komite Sekolah. Demikian juga dalam proses pembentukan hendaknya memperhatikan kriteria pengetahuan pendidikan secara umum maupun MBS dan Komite Sekolah.

Kurangnya sosialisasi MBS dan Komite Sekolah telah disadari oleh masyarakat terutama jika melihat perannya yang tidak jauh berbeda dengan BP3. Bahkan lebih jauh lagi, dalam era otonomi sekolah, peran Komite Sekolah lebih dititikberatkan pada penggalan dana. Hal ini sedikit menyimpang dari idealisme Komite Sekolah. Kurangnya sosialisasi juga menjadikan masyarakat tidak

memiliki perhatian terhadap perkembangan MBS di sekolah. Bahkan, sekolah pun tidak selalu benar-benar memahami arti pentingnya Komite Sekolah seperti yang ditemukan oleh penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Sweeting, dkk (2003).

Untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan khususnya anggota MBS perlu dilakukan sosialisasi secara mendalam baik mengenai MBS secara luas maupun khusus tentang Komite Sekolah tidak hanya pada sekolah yang akan melaksanakannya tetapi juga pada masyarakat secara umum yang akan menerima dampak dari pelaksanaan tersebut agar tidak terjadi selisih paham. Anggota Komite Sekolah juga perlu meningkatkan pengetahuan mereka mengenai MBS agar dapat memberikan arah yang benar tentang fungsi dan tugas pokok mereka. Peningkatan pengetahuan ini diharapkan akan meningkatkan kinerja mereka

3. Hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan Kinerja Komite Sekolah

Harga koefisien korelasi (r) parsial untuk pendidikan dan kinerja Komite Sekolah jika pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dikendalikan menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang bermakna antara pendidikan dan kinerja Komite Sekolah jika pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dikendalikan. Dengan demikian pendidikan hampir tidak mempengaruhi kinerja Komite Sekolah.

Keadaan ini sepertinya tidak mendukung dua temuan di atas. Beberapa hal tampaknya harus dilihat sebagai faktor penyebab dari temuan ini. Pertama, dari jumlah responden sebanyak 77 orang, rata-rata tingkat pendidikan yang dimiliki

cukup tinggi, yaitu 3,43. Jumlah responden dengan pendidikan D3 ke atas adalah 55 orang atau 71,43%, sementara responden dengan pendidikan S1 berjumlah 39 orang atau 50,64%. Hal ini menyebabkan data terkonsentrasi pada daerah tingkat pendidikan tinggi atau lebih khusus lagi pada tingkat pendidikan S1 sehingga dapat menjadi penyebab beda kinerja antar anggota komite tidak terlalu bermakna untuk tingkat pendidikan sebagai prediktor.

Kedua, terdapat beberapa kasus yang berbeda dengan harapan. Terdapat 4 responden dengan pendidikan S1 yang memiliki kinerja di bawah 60, pada sisi lain kinerja tertinggi dengan nilai 96,30 (tabel 5) dimiliki oleh responden dengan pendidikan SMA dan SMP. Data-data ini berkebalikan dengan prediksi bahwa semakin tinggi pendidikan anggota Komite Sekolah semakin tinggi pula kinerjanya. Hal menarik yang perlu dicermati yaitu adanya kekhawatiran masyarakat bahwa ada kecenderungan anggota Komite Sekolah yang dipilih merupakan orang yang punya jabatan dan hidup mapan, sehingga secara finansial tidak kesulitan akibatnya mereka tidak terlalu peduli dengan perkembangan sekolah. Sementara waktu mereka bekerja sebagai anggota komite juga terbatas. Golongan ini dapat menjadi penyumbang responden dengan tingkat pendidikan tinggi dan kinerja yang rendah.

Ketiga, anggota Komite Sekolah dipilih dari antara orangtua murid yang anaknya menempuh pendidikan di sekolah tersebut. Keanggotaan mereka dapat berubah setiap tahun atau paling lama tiga tahun selama anak mereka bersekolah di SMA. Singkatnya masa jabatan ini menjadikan Komite Sekolah sukar untuk menjalankan program kerja yang panjang dan berkesinambungan karena setiap

kepengurusan akan memberikan arah dan cara sendiri untuk mencapai tujuannya. Keadaan ini akan menjadikan anggota Komite Sekolah menyerahkan segala keputusan pada pihak sekolah. Akibatnya, anggota Komite Sekolah enggan atau tak mampu menjalankan fungsi kontrolnya, kinerja mereka menjadi rendah tanpa pengaruh tingkat pendidikan yang dimiliki.

Penyebab lain yang juga perlu diungkap adalah usia anggota komite berbeda-beda. Hal ini memberikan indikasi bahwa masa persekolahan yang dilewati oleh setiap anggota komite juga berbeda. Sebagaimana diketahui, pada kurun yang berbeda ini kurikulum Indonesia berkembang dan berubah. Perubahan ini sesuai dengan tuntutan kemajuan masyarakat. Pada sisi lain perubahan kurikulum juga menekankan visi yang berbeda, seperti yang disampaikan oleh Supratiknya (2005) masing-masing jenjang pendidikan, segi-segi tertentu dari substansi tujuan pendidikan akan berlainan dari zaman ke zaman sesuai dengan perkembangan ilmu-teknologi dari masyarakat. Berdasarkan hal ini dapat dianalisis bahwa tahun kelulusan seseorang dari suatu tingkat pendidikan akan berpengaruh pada bekal yang diterimanya, artinya meskipun dari tingkat pendidikan yang sama dapat dimungkinkan kompetensi yang dimilikinya berbeda karena perbedaan tahun kelulusan

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis dan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Ada hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan anggota Komite Sekolah dan Pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dengan Kinerja Komite Sekolah. Harga koefisien korelasi ganda, $R = 0,909$, $R^2 = 0,827$, dan persamaan linear $Y = 28,057 + 0.908 * Pendidikan + 0.779 * tahuMBS + \epsilon$.
2. Ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah dengan kinerja Komite Sekolah, harga koefisien korelasi parsial (r) = 0,909 dengan $P = 0,000$ ($P < \alpha$), atau pengetahuan tentang MBS yang dimiliki anggota Komite Sekolah mempengaruhi kinerja Komite Sekolah.
3. Tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan kinerja Komite Sekolah, harga koefisien korelasi (r) = 0,205 dengan $P = 0,076$ ($P > \alpha$). Dengan demikian tingkat pendidikan hampir tidak mempengaruhi kinerja Komite Sekolah

B. Saran

1. Untuk sekolah yang akan memilih anggota Komite Sekolah, lembaga ini hendaknya tidak hanya dijadikan kelengkapan syarat pelaksanaan MBS di

sekolah akan tetapi lebih jauh dari itu diperlukan perubahan pola pikir (mind set) yang menempatkan Komite Sekolah sebagai agen dalam pencapaian tujuan untuk sekolah yang lebih mandiri dan demokratis. Dengan demikian anggota Komite Sekolah juga dipilih dari orang-orang yang benar-benar memperhatikan kemajuan sekolah dan pendidikan.

2. Agar dapat melaksanakan fungsi Komite Sekolah dengan baik, terutama fungsi kontrol, anggota Komite Sekolah tidak hanya berasal dari orang tua siswa di sekolah itu akan tetapi juga dapat berasal dari berbagai elemen masyarakat yang memperhatikan pendidikan. Arah tujuan jangka panjang sebaiknya ditetapkan secara matang sehingga pergantian pengurus yang dinamis tidak terlalu berpengaruh terhadap pencapaian tujuan meskipun dengan metode yang mungkin selalu berubah
3. Pihak sekolah maupun dinas perlu melakukan sosialisasi secara mendalam baik mengenai MBS secara luas maupun khusus pada Komite Sekolah tidak hanya pada sekolah yang akan melaksanakannya tetapi juga pada masyarakat secara umum yang akan menerima dampak dari pelaksanaan tersebut agar tidak terjadi salah paham
4. Anggota Komite Sekolah yang sedang menjalankan tugas hendaknya selalu meningkatkan pengetahuannya tentang MBS dan Komite Sekolah. Pengetahuan ini akan memberikan arah yang tepat dalam menjalankan tugasnya.
5. Beberapa variabel pendukung kinerja, misalnya lama waktu menjabat sebagai anggota komite, pengalaman sebagai anggota Komite Sekolah atau lembaga

yang sejenis, pekerjaan, pendidikan nonformal, tahun kelulusan, akses terhadap informasi belum terungkap dengan jelas pada penelitian ini sehingga perlu diteliti lebih jauh mengenai hal tersebut. Penelitian dengan responden yang lebih luas juga dapat dijadikan pendukung untuk menentukan apakah tingkat pendidikan dan pengetahuan anggota komite merupakan faktor terpenting bagi peningkatan kinerja.

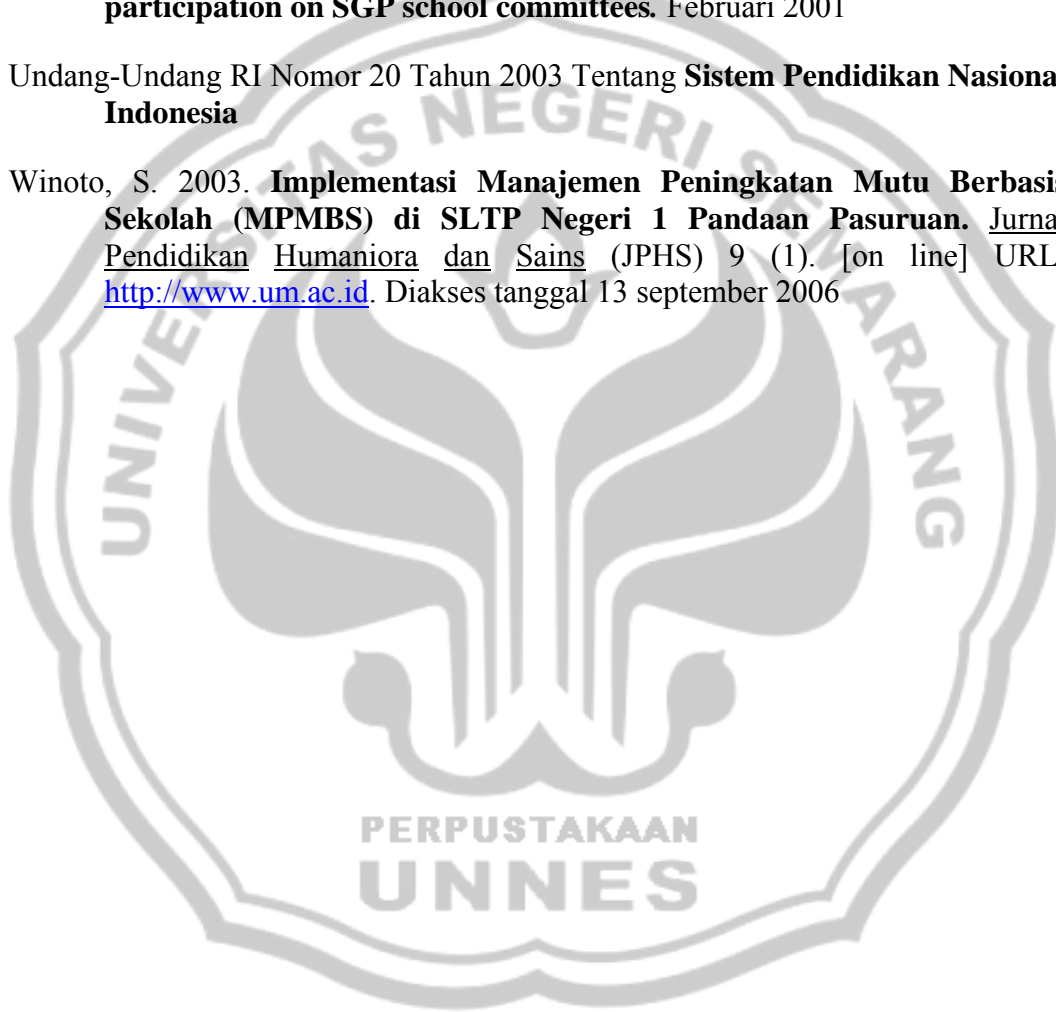


DAFTAR PUSTAKA

- Admadipurwa, A. 2003. **MBS Perbesar Potensi Ekonomi Sekolah?** Didaktika. Kompas Senin, 15 Desember 2003
- As'ad.M. 1998. **Psikologi Industri**. Edisi keempat. Yogyakarta : Liberty.
- Depdiknas. 2003. **Peran Komite Sekolah**. [on line] URL: <http://www.dikmenum.go.id> Diakses tanggal 10 Maret 2006
- _____ 2004. **Acuan Operasional dan Indikator Kinerja Komite Sekolah**. Depdiknas. Dirjendikdasmen. Jakarta
- _____ 2005a. **Manajemen Berbasis Sekolah**. [on line] URL: <http://www.dikmenum.go.id>. Diakses tanggal 14 April 2006
- _____ 2005b. **MBS dalam Praktik**. [on line] URL: <http://www.dikmenum.go.id>. Diakses tanggal 10 Maret 2006
- _____ 2005c. **MBS dalam Teori**. [on line] URL: <http://www.dikmenum.go.id>. Diakses tanggal 10 Maret 2006
- _____ 2006. **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah**. Dirjen Mandikdasmen.
- Fattah, N. 2004. **Konsep Manajemen Berbasis Sekolah(MBS) dan Dewan Sekolah**. Bandung : Pustaka Bani Quraisy
- Handayani, R.W 2004. **Pengaruh Pelatihan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Laris Semarang**. Skripsi FISIP UNDIP [on line] URL: <http://fisip.undip.ac.id/>) diakses tanggal 13 September 2006
- Irawan, A. **Kontroversi Komite Sekolah**. Koran Tempo Selasa, 07 Desember 2004
- Mardiyono. **Menyoal Peran Komite Sekolah**. Kompas Senin, 02 Agustus 2004
- Nurkolis. 2003. **Manajemen Berbasis Sekolah(MBS): Teori, Model dan Aplikasinya**. Grasindo: Jakarta
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 Tentang **Standar Nasional Pendidikan**

- Robins, S.P. 1996. **The Administrative Process**. 2nd edition. New Delhi. Prentice Hall of India Private Limited.
- Rosyidi, U. 2005. **Perkuat Komite Sekolah: Keterbukaan Harus Dimulai dari Kepala Sekolah**. Kompas. Sabtu 3 September 2005
- Setiani, H. 2006. **Analisis Implementasi Kebijakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) Di Gugus 03 Kecamatan Mojosari Kabupaten Mojokerto (Analysis of Implementing Management Policy of School-Based Quality Improvement (MPMBS) at Group 03 of Mojosari Subdistrict, Mojokerto Manucipality)**. Tesis. SPs. UNESA
- Siahaan, A., Khairuddin, dan Irwan Nasution. 2006. **Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah**. Jakarta : Quantum Teaching
- Slamet, PH, 2004. **Manajemen Berbasis Sekolah**. Jurnal Pendidikan [on line] URL: [http:// www.depdiknas.org](http://www.depdiknas.org) (diakses tanggal 13 September 2006)
- Solihudien, Y. 2005. **"Mengawinkan" Komite dan Kepala Sekolah** Pikiran Rakyat Selasa, 09 Agustus 2005
- Sudarminta, J, S.J. 2005. **Beberapa implikasi perkembangan IPTEK dewasa ini bagi pendidikan di Indonesia [Pelangi Pendidikan: Tinjauan dari Berbagai Perspektif**. Eds Slamet Suwandi, dkk. Cet. I] (193 – 206) Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Sukarno ,M., Soewartoyo, dan T. Handayani. **Menuju Otonomi Pendidikan dan Otonomi Di Daerah**. [on line] URL: <http://lipi.or.id>
- Sunarno. 2005. **Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Ditinjau dari Tingkat Pendidikan di SMP Kecamatan Mojogedang Karanganyar Tahun Pelajaran 2005 / 2006**. Tesis. SPs. UNS
- Suparno, P. 1997. **Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan**. Yogyakarta: Kanisius
-
- _____ 2005. **Hak asasi manusia tentang pendidikan dan pendidikan hak asasi manusia**. [Pelangi Pendidikan: Tinjauan dari Berbagai Perspektif. Eds Slamet Suwandi, dkk. Cet. I] (123 – 140) Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma
- Supratiknya, A. 2005. **Sistem pendidikan Indonesia saat ini dalam perspektif psikologis [Pelangi Pendidikan: Tinjauan dari Berbagai Perspektif**. Eds Slamet Suwandi, dkk. Cet. I] (177 – 192) Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma

- Suryadi, A. 2003. **Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah: Mewujudkan Sekolah-Sekolah yang Mandiri dan Otonom.** Disampaikan dalam Sosialisasi Pemberdayaan Komite Sekolah selama Juni 2003
- Sweeting, E., Muhlisoh, Furaidah, and Supriyono Koes 2003. **Role of School Principal, Role of School Committee, Change in Probolinggo District.** [on line] URL: <http://MBEprject.net/> diakses tanggal 13 September 2006
- The British Council. 2001. **Independent monitoring and evaluation of the Scholarships and grants program: A study on community participation on SGP school committees.** Februari 2001
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang **Sistem Pendidikan Nasional Indonesia**
- Winoto, S. 2003. **Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di SLTP Negeri 1 Pandaan Pasuruan.** Jurnal Pendidikan Humaniora dan Sains (JPHS) 9 (1). [on line] URL: <http://www.um.ac.id>. Diakses tanggal 13 september 2006



Instrumen Penelitian

**Angket Penilaian Mandiri
Kinerja Komite Sekolah**

Petunjuk:

1. Tuliskan data diri Anda pada tempat yang disediakan
2. berilah nilai untuk setiap pernyataan kegiatan operasional yang dilakukan oleh Komite Sekolah Anda atau Anda sebagai anggota Komite Sekolah dengan memberi tanda () pada kolom nilai
nilai 0 = tidak pernah dilakukan
nilai 1 = hanya sekali dilakukan
nilai 2 = jarang dilakukan
nilai 3 = sering dilakukan
nilai 4 = sering dilakukan dan terjadwal

Nama : _____

NAMA SMA : _____

Pendidikan Terakhir : _____

No	Kegiatan Operasional	Nilai				
		0	1	2	3	4
1.	mengadakan pendataan kondisi social ekonomi keluarga peserta didik dan sumber daya pendidikan dalam masyarakat					
2.	menganalisis hasil pendataan sebagai bahan pemberian masukan, pertimbangan, dan atau rekomendasi kepada sekolah					
3	menyampaikan masukan pertimbangan dan atau rekomendasi secara tertulis kepada sekolah dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan dan Dewn Pendidikan					
4	memberikan pertimbangan kepada sekolah dalam rangka pengembangan kurikulum muatan local					
5	memberikan pertimbangan kepada sekolah untuk meningkatkan proses pembelajaran dan pengajaran yang menyenangkan (PAKEM)					
6	memberikan masukan dan pertimbangan kepada sekolah dalam penyusunan visi, misi, tujuan, kebijakan, dan kegiatan sekolah					
7	mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala					

	dan incidental dengan orangtua dan anggota masyarakat					
8	mencari bantuan dana dari dunia usaha dan industri untuk biaya pembebasan uang sekolah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu					
9	mengimbuu dan mengadakan pendekatan kepada orang tua dan masyarakat yang dipandang mampu untuk dapat menjadi narasumber dalam kegiatan intrakurikuler bagi peserta didik					
10	memberikan dukungan untuk pemeriksaan kesehatan anak – anak					
11	memberikan dukungan kepada sekolah untuk secara preventif dan kuratif dalam memberantas penyebarluasan narkoba di sekolah					
12	memberikan dukungan kepada sekolah dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah					
13	memverifikasi RAPBS yang diajukan oleh kepala sekolah					
14	memberikan pengesahan terhadap RAPBS setelah proses verifikasi dalam rapat pleno KS					
15	memotivasi masyarakat kalangan menengah ke atas untuk meningkatkan komitmennya bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah					
16	membantu sekolah dalam rangka penggalangan dana masyarakat untuk pengumpulan dana abadi					
17	melaksanakan konsep subsidi silang dalam penarikan iuran dari orang tua siswa					
18	mengadakan kegiatan inovatif untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat, misalnya panggung hiburan untuk sekolah dan masyarakat					
19	membantu sekolah dalam menciptakan hubungan kerjasama antara sekolah dengan orangtua dan masyarakat					
20	mengadakan rapat atau pertemuan secara rutin atau incidental dengan kepala sekolah dan dewan guru					
21	mengadakan kunjungan atau silaturahmi ke sekolah atau dewan guru					
22	meminta penjelasan kepada sekolah tentang hasil belajar siswa					
23	bekerjasama dalam kegiatan penelusuran alumni					
24	membina hubungan dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh stakeholder pendidikan,					

	khususnya dengan DUDI					
25	mengadakan penjajagan tentang kemungkinan penjalinan kerjasama atau MOU dengan lembaga lain untuk memajukan sekolah					
26	menyebarkan kuesioner untuk memperoleh masukan, saran, dan ide kreatif dari masyarakat					
27	menyampaikan laporan kepada sekolah secara tertulis, tentang hasil pengamatannya terhadap sekolah					



ANGKET PENILAIAN MANDIRI TENTANG MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH

PETUNJUK PENGISIAN

1. Tulis data diri pada tempat yang disediakan.
2. Pilih salah satu jawaban dengan cara memberi tanda silang (X) pada huruf didepan jawaban.

IDENTITAS

Nama :

Nama SMA :

Pendidikan Terakhir :

4. Berikut ini pernyataan yang tepat mengenai Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah....
 - A. pengembangan sekolah menjadi lembaga swadana
 - B. pengelolaan sekolah secara mandiri oleh pihak sekolah
 - C. pengelolaan sekolah diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat
 - D. pengelolaan sekolah secara otonomi dengan melibatkan pengambilan keputusan secara partisipatif
 - E. pengelolaan sekolah secara otonomi dengan melibatkan pengambilan keputusan secara terpusat
5. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan untuk....
 - A. Meningkatkan mutu sekolah melalui perbaikan sarana dan prasarana sekolah
 - B. Meningkatkan masyarakat melalui penggalangan dana
 - C. Memberikan hak sepenuhnya kepada masyarakat terhadap pengelolaan sekolah
 - D. Meningkatkan tanggung jawab orangtua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah
 - E. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai
6. MBS bukan....
 - A. motor penggerak perubahan manajemen persekolahan
 - B. berfokus pada tindakan administratif
 - C. jalan menuju peningkatan mutu sekolah
 - D. perwujudan otonomi di sekolah
 - E. alat mencapai tujuan yang lebih baik

7. Dalam mengimplementasikan MBS terdapat 4 (empat) prinsip yang harus dipahami. Berikut ini yang bukan termasuk prinsip tersebut adalah....
 - A. kemandirian
 - B. kekuasaan
 - C. pengetahuan
 - D. sistem informasi
 - E. sistem penghargaan

8. teori yang digunakan MBS untuk mengelola sekolah didasarkan pada empat prinsip. Salah satunya adalah ekuifinalitas, artinya
 - A. hal yang terpenting adalah tujuan akhir, bukan proses
 - B. proses menjadi sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan akhir
 - C. pencapaian tujuan sangat tergantung pada situasi dan kondisi
 - D. penggunaan cara yang baku untuk memecahkan masalah
 - E. kemandirian keuangan menjadi tujuan akhir MBS

9. dalam hal mengambil keputusan, kekuasaan kepala sekolah menurut MBS....
 - A. bersifat mutlak
 - B. harus didelegasikan
 - C. berada di bawah komite sekolah
 - D. dilaksanakan dengan demokratis
 - E. lebih kecil

10. prinsip desentralisasi menginginkan...
 - A. segala bentuk pengelolaan sekolah diatur oleh sekolah itu sendiri
 - B. tidak ada aturan yang berlaku secara nasional
 - C. kondisi sekolah sangat berpengaruh bagi penerapan kebijakan
 - D. pemberian kekuasaan pada sekolah untuk menyelesaikan masalahnya sendiri
 - E. pemecahan masalah harus diserahkan kembali pada pemerintah

11. Dalam upaya mengembangkan pengetahuan warga sekolah, terutama pengelolaan MBS, langkah yang sebaiknya dilakukan adalah....
 - A. membentuk tim tutorial
 - B. menggiatkan pelatihan
 - C. berlangganan koran
 - D. menyebarkan brosur dan pamflet
 - E. menggiatkan bidang penelitian dan pengembangan

12. Sistem informasi yang dimiliki oleh sekolah akan menunjang keberhasilan pelaksanaan MBS. Tujuan utama sistem informasi ini tidak diarahkan untuk....
 - A. menyebarluaskan kondisi sekolah
 - B. menjaring aspirasi masyarakat tentang sekolah
 - C. menyebarluaskan bukti prestasi sekolah
 - D. memudahkan monitoring dan evaluasi
 - E. menambah pengetahuan lewat media massa

13. pemberian penghargaan pada warga sekolah
- A. berdasarkan masa kerja
 - B. tidak harus rutin
 - C. bersifat insidental dan tergantung dana
 - D. meningkatkan motivasi kerja
 - E. akan membudayakan persaingan
14. dalam pelaksanaan MBS, komponen manajemen seharusnya dapat melakukan hal – hal berikut kecuali....
- A. menyusun rencana sekolah dan merumuskan kebijakan
 - B. mengelola operasional sekolah
 - C. menjamin adanya komunikasi yang efektif antara sekolah dan masyarakat
 - D. mendorong partisipasi masyarakat
 - E. mengendalikan keuangan sekolah
15. peran serta masyarakat yang diharapkan dalam pelaksanaan MBS adalah....
- A. memonitor dan mengevaluasi perkembangan sekolah
 - B. sumber dana untuk perkembangan sekolah
 - C. mengaktifkan kegiatan belajar mengajar
 - D. mendukung kegiatan ekstrakurikuler
 - E. sumber informasi yang akurat mengenai kebijakan sekolah
16. Dalam pelaksanaan MBS, komite sekolah berperan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan sekolah, menyatukan visi dan misi pemerintah dan sekolah serta memperjelas visi dan misi sekolah oleh karena itu sebaiknya komite sekolah diisi oleh
- A. Pemegang kebijakan di pemerintah daerah
 - B. Para pengusaha sebagai penyedia dana
 - C. Orang yang memiliki wawasan luas mengenai pendidikan dan mampu mengkomunikasikannya
 - D. Para guru di sekolah yang bersangkutan
 - E. Anggota DPRD komisi pendidikan
17. Kegiatan belajar mengajar yang sesuai PAKEM berarti...
- A. sesuai standar
 - B. terkendali
 - C. efektif
 - D. monoton
 - E. teramati
18. pengelolaan proses belajar mengajar yang mengarah pada kemandirian bercirikan..
- A. penggunaan metode mengajar yang baku
 - B. selalu mengusahakan tersedianya prasarana yang lengkap dan modern
 - C. berasal dari pengembangan model yang telah diteliti di luar negeri
 - D. sesuai dengan karakteristik siswa dan mata pelajaran
 - E. melampaui beban kurikulum

19. Dampak pelaksanaan MBS yang diinginkan adalah....
- A. masyarakat secara sukarela menyediakan dana bagi pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar di sekolah
 - B. masyarakat ikut andil dalam penentuan anggaran sekolah
 - C. meningkatkan kepercayaan, motivasi, serta dukungan orang tua dan masyarakat terhadap sekolah
 - D. pembelajaran yang didukung oleh sarana dan prasarana modern
 - E. peningkatan jumlah murid sebagai wujud keberhasilan promosi sekolah
20. pelaksanaan MBS perlu direncanakan dengan matang dan dievaluasi, hal-hal yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut, kecuali....
- A. mendata sumber daya yang dimiliki sekolah
 - B. menyusun RAPBS untuk satu tahun ke depan
 - C. menunjuk badan terakreditasi untuk melakukan evaluasi
 - D. melakukan refleksi diri tentang pelaksanaan MB
 - E. melakukan lokakarya untuk evaluasi
21. berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum....
- A. tidak harus dilakukan sesuai dengan standar tetapi disesuaikan dengan kondisi siswa
 - B. harus dilakukan negosiasi dengan warga masyarakat tentang apa yang boleh dan tidak dalam pembelajaran
 - C. sekolah dibebaskan untuk mengembangkan mata pelajaran tertentu
 - D. guru wajib mengembangkan silabus berdasarkan kurikulum
 - E. tidak ada kewajiban bagi guru untuk mengadakan kegiatan bersama dengan guru dari sekolah lain
22. tuntutan MBS dalam hal pembelajaran....
- A. pembelajaran harus berpusat siswa, artinya siswa harus belajar mandiri tanpa bimbingan guru
 - B. pembelajaran selalu dimulai dari kenyataan lapangan yang dihadapi siswa
 - C. pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan dan sumber daya lain di luar sekolah sebagai sumber belajar
 - D. laboratorium sebaiknya tidak digunakan karena semakin mahal
 - E. untuk meningkatkan daya serap siswa, kelas sebaiknya lebih dari 40
23. pembelajaran yang dikehendaki MBS memiliki ciri-ciri berikut, kecuali....
- A. Mengembangkan evaluasi belajar untuk 3 ranah (kognitif, afektif, psikomotorik)
 - B. Mengembangkan bentuk evaluasi sesuai dengan materi pokok
 - C. Mengintegrasikan life skill dalam proses pembelajaran
 - D. Menumbuhkan kegemaran membaca
 - E. Menumbuhkan kegemaran meneliti

24. penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah sebaiknya....
- A. sesuai dengan quota yang diberikan oleh pemerintah pusat
 - B. tergantung jumlah siswa
 - C. tergantung permintaan masyarakat
 - D. disesuaikan dengan analisis kebutuhan
 - E. tidak ditambah karena akan terlalu banyak tenaga tanpa pekerjaan
25. semua warga sekolah merupakan pendukung pelaksanaan MBS, oleh karena itu sebaiknya....
- A. perlu sanksi yang jelas untuk pelanggaran yang dilakukan
 - B. perlu ditumbuhkan motivasi berprestasi tanpa penghargaan
 - C. semua orang harus memiliki kemampuan yang sama
 - D. tenaga yang tidak tersedia tidak dijadikan masalah yang berarti
 - E. pengembangan staf bukan merupakan keharusan sekolah
26. berkaitan dengan peralatan dan perlengkapan sekolah....
- A. pengadaannya merupakan tugas utama sekolah
 - B. pengadaannya disesuaikan dengan analisis kebutuhan sekolah
 - C. hal yang paling utama adalah dapat berdaya guna
 - D. perawatan bukan merupakan tugas manajemen
 - E. pengadaannya ditentukan oleh pemerintah daerah
27. pengelolaan keuangan dinilai baik jika
- A. memberikan keuntungan bagi sekolah
 - B. dana telah mencukupi setiap kebutuhan penyelenggaraan pendidikan
 - C. tidak terjadi defisit anggaran
 - D. ada laporan pertanggungjawaban setiap bulan
 - E. dikelola oleh satu orang agar tidak terjadi pembukuan ganda
28. berikut ini merupakan upaya sekolah mengatasi pembiayaan pendidikan menyukseskan manajemen berbasis sekolah, kecuali....
- A. minta bantuan komite sekolah untuk memobilisir dana dari masyarakat
 - B. melakukan pendekatan yang bersifat khusus kepada masyarakat yang memiliki kemampuan dalam memberikan dana
 - C. menarik kepedulian masyarakat untuk memberikan beasiswa bagi peserta didik yang tidak mampu
 - D. mengadakan pertunjukan untuk menggalang dana
 - E. mengadakan iuran perbulan diluar SPP
29. upaya sekolah dalam melayani siswa dengan baik akan nampak dalam upaya-upaya berikut kecuali....
- A. mengikutsertakan siswa dalam olimpiade keilmuan
 - B. menggiatkan kegiatan kepramukaan
 - C. memberikan kebebasan pada siswa untuk memilih kelas
 - D. mengembangkan bakat keolahragaan melalui ekstrakurikuler
 - E. mengadakan beasiswa melalui subsidi silang

30. Pembentukan Komite Sekolah bertujuan untuk....
- A. memudahkan pemberian ijin pada rencana sekolah yang diusulkan oleh Kepala Sekolah
 - B. membuat jembatan bagi komunikasi sekolah dan masyarakat
 - C. membantu dalam pengumpulan dana dari masyarakat
 - D. membantu pengadaan sarana prasarana sekolah
 - E. membantu tugas Kepala Sekolah dalam pengelolaan sekolah yang mandiri
31. salah satu bentuk peningkatan partisipasi masyarakat terhadap sekolah adalah....
- A. berperan dalam penetapan wali kelas
 - B. menentukan metode pembelajaran yang seharusnya diterapkan
 - C. hanya sebatas pengadaan dana dan sarana
 - D. membantu kegiatan kreativitas siswa dengan menyediakan tempat dan tenaga
 - E. menentukan jumlah SPP
32. Sekolah yang dikelola dengan baik akan menciptakan suasana nyaman bagi penghuninya. Berikut ini hal – hal yang perlu dihindari karena dapat dianggap merusak kenyamanan adalah....
- A. melaksanakan peringatan hari raya keagamaan di sekolah
 - B. melakukan razia rutin terhadap peredaran narkoba di sekolah
 - C. memberikan tindakan tegas bagi siswa yang melanggar hukum
 - D. menjaga jarak tegas antara guru dan murid agar disiplin dapat ditegakkan
 - E. memberikan sistem skor untuk menilai pelanggaran siswa
33. sekolah yang baik
- A. memberi kebebasan dalam pola belajar siswa
 - B. memberi sarana dan prasarana pengembang kreativitas siswa
 - C. menghilangkan sistem hukuman bagi siswa yang melanggar karena tidak mendidik
 - D. membebaskan siswa untuk belajar sesuai dengan keinginannya
 - E. membebaskan siswa dari berbagai macam tarikan keuangan

ANALISIS DATA

Data yang diperoleh ditampilkan pada table 1. Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi dengan terlebih dulu di uji prasyarat, yaitu normalitas dan homogenitas. Semua uji dilakukan dengan menggunakan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$.

Tabel 1. Data Awal

No resp	NAMA	Asal Sekolah	kategori	Sekolah	Pend Akhir	pendidikan	skor PMBS	PMBS	Skor Kinerja	Kinerja
1	YANI	SMA 1 MGL	Tinggi	1	s1	4	8	26.67	53	49.07
2	YONO	SMA 1 MGL	Tinggi	1	s1	4	10	33.33	79	73.15
3	MUCH	SMA 1 MGL	Tinggi	1	s1	4	13	43.33	73	67.59
4	EDI	SMA 1 MGL	Tinggi	1	s1	4	15	50.00	86	79.63
5	MUJI	SMA 1 MGL	Tinggi	1	s1	4	20	66.67	102	94.44
6	WIDO	SMA 1 MGL	Tinggi	1	s1	4	21	70.00	103	95.37
7	SUCA	SMA 1 MGL	Tinggi	1	s1	4	23	76.67	96	88.89
8	TRI	SMA 1 MGL	Tinggi	1	s2	5	14	46.67	72	66.67
9	KARNO	SMA 1 MGL	Tinggi	1	s2	5	16	53.33	78	72.22
10	HEND	SMA 1 MGL	Tinggi	1	sma	2	12	40.00	57	52.78
11	HARI	SMA 3 MGL	Tinggi	1	s1	4	16	53.33	85	78.70
12	YOSO	SMA 3 MGL	Tinggi	1	s1	4	16	53.33	79	73.15
13	ENDA	SMA 3 MGL	Tinggi	1	s1	4	18	60.00	86	79.63
14	ABDU	SMA 3 MGL	Tinggi	1	s2	5	9	30.00	58	53.70
15	MADI	SMA 3 MGL	Tinggi	1	s2	5	21	70.00	95	87.96
16	TRI C	SMA 3 MGL	Tinggi	1	s2	5	22	73.33	98	90.74
17	YOGA	SMA 3 MGL	Tinggi	1	sma	2	14	46.67	84	77.78
18	ALFI	SMA 3 MGL	Tinggi	1	smp	1	16	53.33	72	66.67
19	HADI	SMA 1 MTL	Tinggi	1	d3	3	20	66.67	91	84.26
20	NN	SMA 1 MTL	Tinggi	1	s1	4	13	43.33	67	62.04
21	MUNA	SMA 1 MTL	Tinggi	1	s1	4	16	53.33	76	70.37
22	EDI	SMA 1 MTL	Tinggi	1	s1	4	19	63.33	91	84.26
23	EKO	SMA 1 MTL	Tinggi	1	s1	4	21	70.00	91	84.26

24	WADI	SMA 1 MTL	Tinggi	1	s2	5	23	76.67	102	94.44
25	MADI	SMA 1 MTL	Tinggi	1	sma	2	11	36.67	65	60.19
26	SUTI	SMA 1 MTL	Tinggi	1	sma	2	20	66.67	85	78.70
27	TITI	SMA 4 MGL	Sedang	0	d3	3	17	56.67	83	76.85
28	IDRIS	SMA 4 MGL	Sedang	0	d3	3	19	63.33	88	81.48
29	SUPA	SMA 4 MGL	Sedang	0	s1	4	11	36.67	52	48.15
30	SUT	SMA 4 MGL	Sedang	0	s1	4	12	40.00	55	50.93
31	TIYO	SMA 4 MGL	Sedang	0	s1	4	16	53.33	74	68.52
32	RIZE	SMA 4 MGL	Sedang	0	s1	4	18	60.00	87	80.56
33	ROTO	SMA 4 MGL	Sedang	0	s1	4	20	66.67	83	76.85
34	YADI	SMA 4 MGL	Sedang	0	s1	4	21	70.00	93	86.11
35	SITI	SMA 2 MGL	Sedang	0	s1	4	19	63.33	85	78.70
36	YONO	SMA 2 MGL	Sedang	0	s1	4	19	63.33	87	80.56
37	GANY	SMA 2 MGL	Sedang	0	s1	4	24	80.00	93	86.11
38	MANA	SMA 2 MGL	Sedang	0	s1	4	24	80.00	98	90.74
39	MONO	SMA 1 MKD	Sedang	0	s1	4	10	33.33	59	54.63
40	WADA	SMA 1 MKD	Sedang	0	sma	2	16	53.33	72	66.67
41	FATH	SMA 1 MKD	Sedang	0	sma	2	19	63.33	84	77.78
42	DJUP	SMA 1 MKD	Sedang	0	sma	2	21	70.00	96	88.89
43	MUGO	SMA 1 MKD	Sedang	0	smp	1	16	53.33	77	71.04
44	TONO	SMA 1 BDGN	Sedang	0	s1	4	24	80.00	98	90.74
45	ANDI	SMA 1 BDGN	Sedang	0	sma	2	23	76.67	95	87.96
46	RUB	SMA 1 BDGN	Sedang	0	sma	2	23	76.67	96	88.89
47	EKO	SMA 1 BDGN	Sedang	0	sma	2	24	80.00	97	89.81
48	SUNA	SMA 1 BDGN	Sedang	0	sma	2	24	80.00	101	93.52
49	KHAE	SMA 1 BDGN	Sedang	0	sma	2	24	80.00	104	96.30
50	M JUM	SMA 1 BDGN	Sedang	0	smp	1	24	80.00	104	96.30
51	TUTI	SMA 5 MGL	Rendah	-1	d3	3	21	70.00	94	87.04
52	TIT	SMA 5 MGL	Rendah	-1	s1	4	14	46.67	72	66.67
53	SUKW	SMA 5 MGL	Rendah	-1	s1	4	15	50.00	76	70.37
54	NURI	SMA 5 MGL	Rendah	-1	s1	4	17	56.67	85	78.70
55	SUBA	SMA 5 MGL	Rendah	-1	s1	4	19	63.33	83	76.85
56	END	SMA 5 MGL	Rendah	-1	s1	4	19	63.33	84	77.78

57	YUNI	SMA 5 MGL	Rendah	-1	s1	4	19	63.33	86	79.63
58	SUKA	SMA 5 MGL	Rendah	-1	s1	4	21	70.00	93	86.11
59	SRI	SMA 5 MGL	Rendah	-1	s1	4	21	70.00	93	86.11
60	MUN	SMA 5 MGL	Rendah	-1	s1	4	23	76.67	99	91.67
61	KUS	SMA 5 MGL	Rendah	-1	s1	4	23	76.67	101	93.52
62	DEDY	SMA 5 MGL	Rendah	-1	s2	5	23	76.67	101	93.52
63	YUNI	SMA 5 MGL	Rendah	-1	sma	2	18	60.00	81	75.00
64	DIDI	SMA SLMN	Rendah	-1	d3	3	18	60.00	79	73.15
65	DARY	SMA SLMN	Rendah	-1	d3	3	19	63.33	82	75.93
66	IK	SMA SLMN	Rendah	-1	s1	4	20	66.67	87	80.56
67	SUTE	SMA SLMN	Rendah	-1	sma	2	16	53.33	86	79.63
68	SUMA	SMA SLMN	Rendah	-1	sma	2	20	66.67	84	77.78
69	UDIN	SMA SLMN	Rendah	-1	smp	1	15	50.00	69	63.89
70	TOPO	SMA 1 MYDN	Rendah	-1	s1	4	17	56.67	92	85.19
71	NOOR	SMA 1 MYDN	Rendah	-1	s1	4	21	70.00	92	85.19
72	NOTO	SMA 1 MYDN	Rendah	-1	s2	5	8	26.67	68	62.96
73	SOEH	SMA 1 MYDN	Rendah	-1	s2	5	16	53.33	79	73.15
74	WITO	SMA 1 MYDN	Rendah	-1	s2	5	18	60.00	87	80.56
75	HIMA	SMA 1 MYDN	Rendah	-1	sma	2	15	50.00	72	66.67
76	ROTO	SMA 1 MYDN	Rendah	-1	sma	2	18	60.00	87	80.56
77	AKMA	SMA 1 MYDN	Rendah	-1	sma	2	18	60.00	87	80.56

Keterangan:

Kriteria Sekolah : 1 = kategori tinggi, 0 = kategori sedang, -1 = kategori rendah

Pendidikan = Pendidikan terakhir responden, 1 = SMP; 2 = SMA; 3 = D3; 4 = S1; 5 = S2

Rangkuman kinerja berdasarkan pendidikan

Kinerja

Pendidikan	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
1.00	4	63.89	96.30	297.90	74.4750	14.84464
2.00	18	52.78	96.30	1419.47	78.8594	11.56493
3.00	6	73.15	87.04	478.71	79.7850	5.34850
4.00	39	48.15	95.37	3031.50	77.7308	12.21354
5.00	10	53.70	94.44	775.92	77.5920	14.06151
Total	77	48.15	96.30	6003.50	77.9675	11.81679

Rangkuman kinerja berdasarkan Pengetahuan MBS

Kinerja

TahuMBS	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
26.67	2	49.07	62.96	112.03	56.0150	9.82171
30.00	1	53.70	53.70	53.70	53.7000	.
33.33	2	54.63	73.15	127.78	63.8900	13.09562
36.67	2	48.15	60.19	108.34	54.1700	8.51357
40.00	2	50.93	52.78	103.71	51.8550	1.30815
43.33	2	62.04	67.59	129.63	64.8150	3.92444
46.67	3	66.67	77.78	211.12	70.3733	6.41436
50.00	4	63.89	79.63	280.56	70.1400	6.86091
53.33	10	66.67	79.63	720.12	72.0120	4.45104
56.67	3	76.85	85.19	240.74	80.2467	4.37984
60.00	7	73.15	80.56	550.02	78.5743	3.13808
63.33	9	75.93	84.26	712.97	79.2189	2.58194
66.67	6	76.85	94.44	492.59	82.0983	6.58935
70.00	9	84.26	95.37	787.04	87.4489	3.27679
73.33	1	90.74	90.74	90.74	90.7400	.
76.67	7	87.96	94.44	638.89	91.2700	2.66517
80.00	7	86.11	96.30	643.52	91.9314	3.69506
Total	77	48.15	96.30	6003.50	77.9675	11.81679

3. Uji persyaratan analisis

a. Uji Normalitas

Data yang diperoleh diuji dengan menggunakan Uji normalitas Lilliefors yang bertujuan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi berdistribusi normal.

Prosedur uji liliefors sebagai berikut :

2) Hipotesis

Ho = Sampel berdistribusi normal

H1 = Sampel berdistribusi tidak normal.

3) Dipilih taraf signifikansi $\alpha = 0,05$

4) Kriteria pengujian Ho ditolak apabila statistik penguji $P > \alpha$

5) Harga yang dihitung

a. Mean Sampel $X = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

b. Standar Deviasi $\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - x)^2}$

c. $T = \text{maksimum} / F^*(x) - S(x)$

Dimana :

$F^*(x)$ = Fungsi distribusi kumulatif normal standar

$S(x)$ = Fungsi distribusi kumulatif empirik Zi

6) Hasil uji dengan SPSS Rel 15.0 For Windows

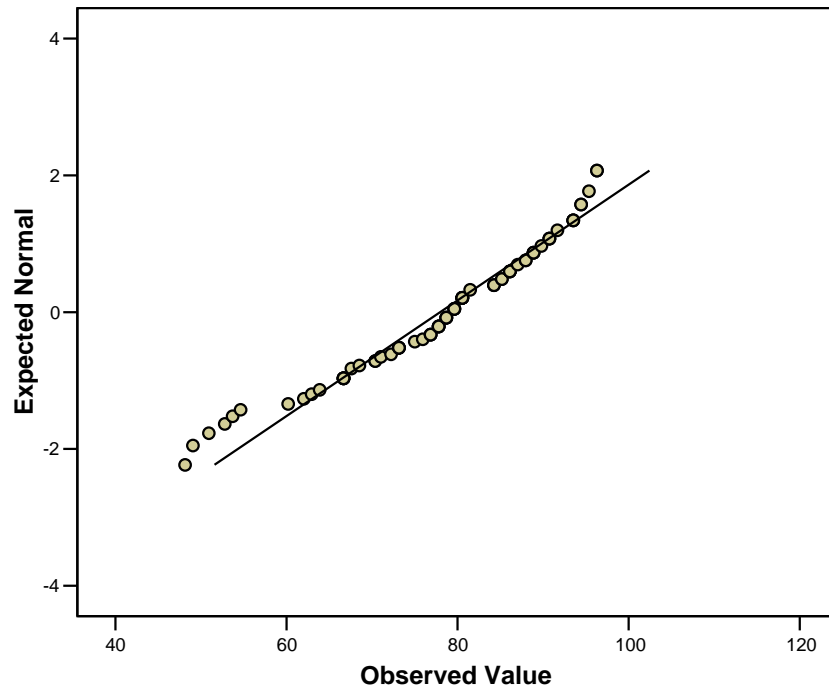
Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov(a)			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kinerja	.112	77	.019	.953	77	.006

a Lilliefors Significance Correction

PERPUSTAKAAN
UNNES

Normal Q-Q Plot of Kinerja



7) Keputusan: dengan melihat tingkat signifikansi ($P < 0,05$) berarti bahwa sample berasal dari populasi normal

b. Uji Homogenitas

Data yang diperoleh diuji dengan menggunakan rumus uji homogen dari Bartlett yang bertujuan untuk mengetahui apakah sampel berasal dari populasi berdistribusi dari varian yang homogen.

Prosedur uji Homogen Bartlett Sebagai berikut :

1) Hipotesis

H_0 = Sampel berdistribusi dari varian yang homogen

H_1 = Sampel berdistribusi dari varian yang heterogen.

2) Dipilih taraf signifikansi $\alpha = 0,05$

3) Kriteria pengujian H_0 ditolak apabila $P > \alpha$ di mana

$$B = \frac{(\sum v_j) \ln(\sum v_i) - \sum v_j \ln S_j}{1 + \{\sum (1/v_j) - 1/\sum v_j\} / \{3(k-1)\}}$$

keterangan :

$$S_j = \sum_j^{ni} = 1(X_{ij} - x)^2 / (nj - 1), K = \text{Jumlah Sampel}$$

$$v_j = nj - 1$$

4) Hasil uji dengan SPSS Rel 15.0 For Windows

Levene's Test of Equality of Error Variances(a)

Dependent Variable: kinerja

F	df1	df2	Sig.
2.944	41	35	.001

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.

a. Design: Intercept+pendidikan+tahuMBS+pendidikan * tahuMBS

5) Keputusan: dengan melihat tingkat signifikansi = 0,001 ($P < \alpha$) berarti bahwa sampel berasal dari populasi yang homogen

4. Analisis Data

Model regresi linear menggunakan asumsi bahwa hubungan antara variable terikat dengan semua predictor (variable bebas) adalah linear atau membentuk garis lurus dalam penelitian ini hubungan tersebut dinyatakan dalam persamaan berikut.

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

where

Y = nilai variable terikat (KINERJA)

β_0 = nilai konstanta

β = nilai koefisien untuk setiap prediktor

$\beta_1 X_1$ = predictor X_1 (PENDIDIKAN) dikalikan dengan koefisiennya

$\beta_2 X_2$ = predictor X_2 (PENGETAHUAN MBS) dikalikan dengan koefisiennya

ε = kesalahan observasi

Model ini linear karena dengan menaikkan nilai predictor akan menaikkan juga nilai variable terikat. β_0 adalah intersep, nilai prediksi dari variable terikat jika semua nilai predictor = 0.

Hasil Uji:

Penentuan model garis lurus

Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	28.057	3.224		8.704	.000
	Pendidikan	.908	.504	.088	1.801	.076
	TahuMBS	.779	.042	.914	18.780	.000

a Dependent Variable: Kinerja

Berdasarkan hasil ini, model persamaan garis lurus yang dibentuk adalah:

$$Y = 28,057 + 0.908 * Pendidikan + 0.779 * tahuMBS + \varepsilon$$

Tingkat signifikansi untuk pendidikan $P = 0.076$ dengan $\alpha = 0,05$ ($P > \alpha$) menunjukkan bahwa pengaruh pendidikan tidak signifikan terhadap Kinerja

Tingkat signifikansi untuk pengetahuan MBS (tahuMBS) $P = 0.000$ dengan $\alpha = 0,05$ ($P < \alpha$) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari Pengetahuan MBS terhadap Kinerja.

Untuk mengetahui apakah model memberikan prediksi yang baik untuk setiap variasi variable bebas dapat melihat table berikut.

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8771.913	2	4385.956	176.348	.000(a)
	Residual	1840.455	74	24.871		
	Total	10612.368	76			

a Predictors: (Constant), TahuMBS, Pendidikan

b Dependent Variable: Kinerja

Berdasarkan hasil analisis ini, nilai $F_{hitung} = 176,348$ jauh di atas nilai $F_{tabel} (F_{2,74}) = 3,13$. nilai signifikansi (P) = 0,000 atau $P < \alpha$ (0,05). hal ini berarti bahwa variasi yang ditunjukkan oleh model bukan merupakan kebetulan.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.909(a)	.827	.822	4.98708

a Predictors: (Constant), TahuMBS, Pendidikan

R, koefisien korelasi ganda, adalah korelasi linear antara nilai variable terikat yang diamati dan nilai yang diprediksi. Semakin besar nilainya menunjukkan hubungan yang semakin kuat.

R Square, (R^2) adalah koefisien determinasi yang merupakan kuadrat dari koefisien korelasi ganda.

Hasil analisis menunjukkan bahwa $R^2 = 0,827$ atau lebih dari 80% variansi dapat diprediksi dengan menggunakan persamaan regresi yang diperoleh

